

**LAMPIRAN 1**  
**INSTRUMEN KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH**

No	Parameter	Variabel	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengetahuan	Pengetahuan	a. Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan b. Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana c. Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami d. Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis			
2.	Kebijakan	Kebijakan	a. Tersedianya kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola bencana b. Terdapat rencana aksi untuk tanggap darurat c. Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana d. Terdapat kebijakan lain yang mendukung kesiapsiagaan seperti RTRW, Renstra, IMB, SNI			
		Peraturan	e. Terdapat peraturan terkait organisasi pengelola bencana dan prosedur tetap pelaksanaan f. Terdapat peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi g. Terdapat peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat) dan protap pelaksanaan h. Terdapat peraturan terkait sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan			
3.	Rencana Tanggap Darurat	Organisasi pengelola bencana	a. Tersedianya divisi pengelola bencana b. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan			

No	Parameter	Variabel	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rencana evakuasi	c. Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian d. Tersedia peta bahaya tsunami dan peta evakuasi e. Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi f. Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan			
		Posko bencana	g. Tersedia posko bencana dan protap pelaksanaan h. Tersedia nomor <i>hotline</i> informasi bencana			
		Pertolongan pertama, penyelamatan, keselamatan, dan keamanan	i. Tersedia rencana untuk pertolongan pertama korban (obat-obatan, tenaga medis, peralatan/ambulan) j. Tersedia rencana penyelamatan korban bencana dan transportasi/sistem ambulan k. Tersedia unit SAR dan protap			
		Pemenuhan kebutuhan dasar	l. Tersedia data alokasi bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar m. Terdapat daftar tempat penyimpanan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar n. Tersedia prosedur pengadaan bahan dan perlengkapan kebutuhan dasar dalam keadaan darurat o. Tersedia prosedur untuk distribusi bahan dan perlengkapan dalam keadaan darurat			
		Peralatan dan perlengkapan	p. Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)			
		Latihan dan simulasi/gladi	q. Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)			
4.	Sistem Peringatan Bencana	Kearifan lokal	a. Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal			

No	Parameter	Variabel	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		TWS/Sistem Peringatan Tsunami	b. Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan			
		Instalasi	c. Terdapat instalasi peralatan untuk peringatan bencana d. Terdapat prosedur pemeliharaan sistem peringatan bencana			
		Diseminasi peringatan dan mekanisme	e. Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan			
		Latihan dan simulasi	f. Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf			
5.	Mobilisasi Sumber Daya	Penataan kelembagaan	a. Terdapat kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan b. Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana			
			c. Tersedia mekanisme untuk mengelola sumber daya dari luar (pihak swasta, donator, NGO, relawan)			
		Sistem komando	d. Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando			
		Komunikasi dan koordinasi antar <i>Stakeholder</i> yang relevan	e. Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah f. Tersedia protokol untuk komunikasi publik yang berkaitan dengan informasi keadaan darurat (secara reguler dan bertanggung jawab) g. Tersedia jaringan kerja di luar pemerintah untuk memobilisasi sektor swasta dan NGO dalam merespon keadaan darurat bencana			
		Sumber Daya Manusia	h. Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat			

No	Parameter	Variabel	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sumber Daya Alam	i. Telah teridentifikasi jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pada saat darurat bencana			
		Bimbingan teknis dan penyediaan materi	j. Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat k. Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan l. Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan m. Tersedia informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi			
		Pendanaan	n. Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana			
		Pemantauan dan evaluasi (monev)	o. Tersedia rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev			

**LAMPIRAN 2**  
**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**

Nama : .....

Usia : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Jabatan : .....

1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?

.....

.....

.....

2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?

.....

.....

.....

3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?

.....

.....

.....

**LAMPIRAN 3**  
**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DAN**  
**WISATAWAN**

Nama : .....

Usia : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Tempat Tinggal : .....



Tujuan Mengunjungi Pantai Parangtritis : .....

No.	Parameter	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengetahuan	a. Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan b. Dapat menjelaskan tipe-tipe, penyebab, ciri-ciri, dan Tindakan penyelamatan saat terjadi bencana c. Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana alam			
2.	Kebijakan	a. Mengetahui adanya kebijakan dan peraturan terkait organisasi pengelola bencana b. Mengetahui adanya pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi c. Mengetahui adanya peraturan terkait sistem peringatan bencana			

No. (1)	Parameter (2)	Indikator (3)	Ya (4)	Tidak (5)	Keterangan (6)
3.	Rencana Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui adanya organisasi pengelola bencana</li> <li>b. Mengetahui adanya pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi</li> <li>c. Mengetahui adanya tempat evakuasi untuk pengungsian</li> <li>d. Mengetahui adanya peta bahaya dan peta evakuasi</li> <li>e. Mengetahui adanya rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi</li> <li>f. Mengetahui adanya rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan</li> <li>g. Mengetahui adanya posko bencana</li> <li>h. Mengetahui adanya nomor <i>hotline</i> informasi bencana</li> <li>i. Mengetahui adanya unit SAR</li> <li>j. Mengetahui adanya peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK) yang disediakan oleh pemerintah</li> <li>k. Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)</li> </ul>			
4.	Sistem Peringatan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal</li> <li>b. Mengetahui adanya teknologi sistem peringatan bencana di sekitar lokasi wisata</li> <li>a. Mengetahui adanya instalasi peralatan untuk peringatan bencana</li> <li>b. Mengetahui adanya sistem penyebarluasan peringatan bencana</li> </ul>			

No.	Parameter	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Mobilisasi Sumber Daya	a. Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana b. Mengetahui adanya komunikasi publik yang berkaitan dengan informasi keadaan darurat (secara regular dan bertanggung jawab) c. Telah mendapatkan bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat d. Telah mendapatkan materi dan bahan untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan e. Telah mendapatkan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan f. Mengetahui informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi			

## LAMPIRAN 4 SURAT IZIN PENELITIAN

	<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN RI</b> <small>Terakreditasi BAN-PT "A"</small>
<p>Nomor : B/109/X/2021          Klasifikasi : Biasa          Lampiran : Satu Lembar          Hal : Permohonan izin penelitian</p>	<p style="text-align: right;">Jakarta, 18 Oktober 2021</p> <p style="text-align: right;">Kepada</p> <p style="text-align: right;">Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di Tempat</p>
<p>1. Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.</li> <li>b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XXI/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Unhan TA. 2021.</li> <li>c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2020/2021.</li> </ol> <p>2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi Jurnal Ilmiah yang terkait dengan program studinya.</li> <li>b. Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI a.n. Islamia Kharimah NIM 120200301012, Nomor HP: 081316602535, email: islamiakharimah31@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami di Kawasan Objek Wisata Pantai".</li> </ol> <p>3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya dibinakan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat tersebut dalam lampiran.</p> <p>4. Demikian mohon menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.</p>	
<p>a.n. Rektor          Universitas Pertahanan          Republik Indonesia          Deputi Fakultas Keamanan Nasional,</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="text-align: left;"> <p><b>Dr. Jamisunasi, S.Sos., MM., C.Fr.A</b>              Marsekal Muda TNI</p> </div> </div>	
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekjen Kemhan RI</li> <li>2. Rektor Unhan RI</li> <li>3. Warek I Unhan RI</li> <li>4. Kasatwas Unhan RI</li> <li>5. Ka LPPM Unhan RI</li> <li>6. <u>Kam AK Unhan RI</u></li> </ol>	
<p>Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29618766</p>	

Lampiran Surat Rektor Unhan RI  
Nomor : B / 105 / X / 2021  
Tanggal : 18 Oktober 2021

**DAFTAR PEJABAT YANG DIWAWANCARA**

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul
6. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
8. Camat Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul
9. Kepala Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul
10. Ketua FPRB Paris Tangguh, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul
11. Tokoh Masyarakat Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Republik Indonesia  
Unitas, Fakultas Keamanan Nasional,  
  
Dr. Syahsunasir, S.Sos., MM., C.Fr.A  
Marsekal Muda TNI

## LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI PENELITIAN



**Gambar Lampiran 1. Wawancara dengan Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Staf Pusdalops, BPBD, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 2. Wawancara dengan PLT Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bappeda, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 3. Wawancara dengan Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana dan Wakil Koordinatort Tagana, Dinas Sosial, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 4. Wawancara dengan Staf Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 5. Wawancara dengan Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata, Dinas Pariwisata, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 6. Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Satpol PP, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 7. Wawancara dengan Staf Bidang Penanggulangan Bencana, PMI, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 8. Wawancara dengan Panewu Anom dan Kawat Sosial, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 9. Wawancara dengan Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 10. Wawancara dengan Kamituwo Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 11. Wawancara dengan Ketua FPRB Paris Tangguh**



**Gambar Lampiran 12. Wawancara dengan Ketua RT 05, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 13. Wawancara dengan Ketua RT 06, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul**



**Gambar Lampiran 14. Wawancara dengan Pedagang di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis**



**Gambar Lampiran 15. Wawancara dengan Wisatawan di Pantai Parangtritis**

## LAMPIRAN 6 TRANSKRIP WAWANCARA

### 1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul (8 November 2021)

#### a. Pengetahuan

##### 1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan

“tsunami dapat mengancam zona merah khususnya di wilayah Pantai Parangtritis, Pantai Samas, dan Pantai Depok. Permukiman penduduk berlokasi dekat dengan pantai, sehingga kalau terjadi tsunami akan mengganggu keberfungsian permukiman, tempat wisata, kawasan pedagang di sekitar pantai.”

##### 2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana

“bencana tsunami itu bisa terjadi karena adanya pergeseran lempeng, lalu terjadi gempa bumi. Karena adanya gempa itu maka bisa memicu terjadinya tsunami. Kalau di Kabupaten Bantul, penyebab tsunami itu ya gempa bumi.”

##### 3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami

“masyarakat setempat sudah menyadari adanya potensi bencana. Karena di Kabupaten Bantul sendiri memang memiliki banyak bencana alam seperti kekeringan, longsor, angin kencang, dan potensi tsunami. Masyarakat juga sudah dapat pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana.”

##### 4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis

“Ada beberapa *shelter* yang sudah tersedia di Jalan Lintas Selatan Pantai Baru. Kalau dari Pantai Parangtritis sudah ada jalur-jalur evakuasi ke Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir terdekat.”

**b. Kebijakan****1) Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana**

“kalau untuk kesiapsiagaan tidak ada. Tapi kami punya alokasi dana untuk pelaksanaan tanggap darurat, saat evakuasi, saat rehabilitasi dan rekonstruksi.”

**2) Terdapat peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat) dan protap pelaksanaan**

“tidak ada, Satpol PP membantu dalam distribusi tersebut tapi tidak ada peraturan tertulisnya.”

**c. Rencana Tanggap Darurat****1) Tersedianya divisi pengelola bencana**

“ada, kami di Bidang Linmas ini yang biasa terlibat dalam penanggulangan bencana, fungsinya ya untuk mendukung penanggulangan bencana supaya ketentraman dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.”

**2) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

“Ada. Didasari oleh Permendagri nomor 26 tahun 2020. Disana disebutkan kalau Satpol PP membantu penanganan bencana untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Linmas ini kan tadinya hansip, nah sekarang linmas jadi bagian dari Satpol PP. Disini ada yang namanya regu keposkoan, regu dapur umum, regu operasi. Nah, kalau terjadi laka air itu komando ada di Satpol PP tapi kalau terjadi bencana seperti tsunami nantinya komando ada di BPBD. Satpol PP ikut membantu tapi komando tetap di BPBD.”

**3) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian**

“ada, kalau di Pantai Parangtritis larinya ke Bulak Mabul.”

**4) Tersedia peta bahaya tsunami dan peta evakuasi**

“ada, tapi kami tidak punya. Itu ada di BPBD.”

**5) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

“kalau rambu tanda bahaya memang untuk wisatawan. Kalau jalur evakuasi ada, tapi memang masih kurang banyak hanya di beberapa titik saja yang diletakkan rambu jalur evakuasi itu.”

**6) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

“iya itu mbak, karena jumlahnya dikit seperti yang tadi saya bilang. Jadi untuk sosialisasi ke masyarakat dan wisatawan yang ada di pantai juga belum bisa optimal karena ketersediaan rambunya juga masih sedikit.”

**7) Tersedia unit SAR dan protap**

“ada. Kami punya rencana untuk penyelamatan korban. Di pantai parangtritis juga ada Gedung SAR, nah SAR itu ada dibawah Satpol PP. mereka memang orang pantai yang sudah paham dengan kondisi pantai. Terus direkrut untuk jadi tim SAR dibawah Satpol PP”.

**8) Tersedia prosedur untuk distribusi bahan dan perlengkapan dalam keadaan darurat**

“biasanya kita dimintai tolong, misal logistik yang harus didistribusikan itu banyak yaa kita diminta untuk bantu angkut dan antarkan logistik itu ke lokasi yang sudah di tentukan.”

**9) Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)**

“kami terlibat, tapi tidak menyelenggarakan. Jadi kami sifatnya membantu pelaksanaan tersebut.”

**10) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

“Ada. gladi kemarin melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, warga sepanjang pesisir, kelurahan, kecamatan, polsek, korawil.

Selapan dino atau setiap 35 hari itu ada sirine yang dibunyikan juga. Tujuannya unuk cek alat apakah masih berfungsi atau tidak, selain itu juga untuk membiasakan masyarakat disana. Supaya mereka paham kalau mendengar sirine itu tandanya apa dan harus berbuat apa. Tapi kalau gladi itu, diadakan 1 tahun sekali belum tentu, jadi memang gladi kesiapsiagaan tidak rutin dilaksanakan.”

**d. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan**

“Kalau untuk penyebarluasan peringatan itu biasanya dari BPBD. Tapi kalau di pantai kan ada SAR, nah mereka kalau ada hal aneh di pantai pasti langsung paham dan bisa ngasih tau ke orang-orang sekitar pantai itu.”

**2) Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf**

“ada. Tim kami sudah dapat pelatihan-pelatihan yang difokuskan pada skill penyelamatan seperti snorkeling dan sebagainya. Jadi kalau terjadi bencana atau laka air, kami sudah siap untuk melakukan penyelamatan.”

**e. Mobilisasi Sumber Daya**

**1) Terdapat kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan**

“ada. Nah itu dikepalai oleh BPBD. Kami mengikuti perintah saja.”

**2) Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana**

“ada tapi tidak tertulis. Kalau terjadi bencana, masyarakat sudah tau siapa yang harus mereka ikuti perintahnya.”

**3) Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando**

“ada, kalau terjadi bencana komando adanya di BPBD.”

**4) Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah**

“ada. Kami pakai HT dan handphone aja.”

**5) Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat**

“sudah ada pelatihan untuk seluruh staf terkait skill penyelamatan.”

**6) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

“belum ada. Di Bantul ini kan ada 14 jenis bencana, tapi untuk informasi-informasi itu belum disosialisasikan secara luas.”

**7) Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan**

“ya itu, belum disosialisasikan ke semua kalangan jadi masih perlu ditingkatkan.”

**8) Tersedia informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi**

“ada, tapi kurang.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“sistem informasi, sumber daya manusia, manajemen, sarana prasarana untuk evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Saat ini sumber daya manusia sudah tersedia dan sudah memiliki kemampuan. Jadi bisa menjadi faktor pendukung dalam kesiapsiagaan.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“*Roadmap* pemerintah belum berkelanjutan. Selalu ada perubahan kebijakan misalnya alokasi dana yang awalnya tersedia dengan baik, di pemerintahan selanjutnya jadi berkurang. Saat ini yang menjadi faktor penghambat ya anggaran dana itu. Ada, tapi terbatas anggarannya.”

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“oh sudah ada upaya-upaya yang kita lakukan seperti menyampaikan proposal-proposal ke bupati dengan menjelaskan anggaran yang dibutuhkan. Tapi sampai sekarang belum ditanggapi.”

**2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul dan Staf Pusdalops BPBD Bantul (3 November 2021)**

**a. Pengetahuan**

**1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “kalau tsunami sendiri yang pernah terjadi, terus terang saya belum pernah alami ya. Paling tsunami yang dulu dari pangandaran itu loh ada, tapi cuma berapa cm aja. Kalau dihitung dari yang pernah ada, sejarahnya tuh kurang lebih tiap 500 tahunan itu ada tsunami. Saya tahu informasi itu dari bmkkg. Jadi ada bekas-bekas pernah terjadi tsunami. Karena ada lapisan tanah pantai itu di perbukitan. Tapi terus terang saya ga tau bener, cuma informasi saja yang saya dapatkan.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “terdapat potensi gempa 8,8 di selatan Pulau Jawa, yang bisa menimbulkan tsunami setinggi 20an meter. Itu menurut kajian, belum dibuktikan. Tapi sejarahnya 500 tahun lalu sudah ada, bekas-bekasnya ada. Kalau penyebab terjadinya tsunami yak arena ada pergeseran lempeng bumi, kemudian terjadi gempa, lalu dia menimbulkan ya tsunami itu. Secara teori ya gitu, karena lempeng itu kan geser. Sama kayak ember, kalau dia pecah atau retak air itu jadi masuk ke celah. Tapi setelah itu kan airnya balik lagi, nah baliknya itukan gelombangnya bisa besar. Bisa juga disebabkan oleh longsor terus terjadi tsunami. Tapi kalau di daerah Bantul paling penyebabnya yak arena pergeseran lempeng itu aja.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “di Parangtritis itu kan rumah-rumah penduduk sangat dekat dengan pantai. Kalau itu terjadi malam hari ya mungkin korban akan banyak sekali. Kita sudah ada titik evakuasi, nanti warga bisa lari ke situ kalau terjadi di siang hari. Tapi kalau malam dan warga sedang tidur itu akan sulit ya, kemungkinan korbannya akan sangat besar. Tapi disini sudah ada FPRB, anggotanya sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, kerentanan masyarakat bisa ditekan karena sudah diberikan sosialisasi juga jadi masyarakat sudah siap. Selain itu, untuk Bantul peringkat destananya juga sudah tinggi. Sumber Daya Manusia dari FPRB di Bantul sudah paling bagus. Sebenarnya kita punya gumuk pasir, gumuk pasir itu sebenarnya benteng alamiah yang bisa menahan tsunami. Tapi dulu sempet ada yang suka ngambil-ngambilin pasir, nah

lama-lama kan gumuk pasir itu jadi berkurang pasirnya, tapi sekarang sudah dilarang nda boleh lagi.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “seperti shelter itu kan darurat, misalnya rumah sakitnya ambruk nah kita pakai shelter darurat. Sudah siap untuk fasilitas yang diperlukan jika harus membuat shelter darurat.”

**b. Kebijakan**

**1) Tersedianya kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola bencana**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada. Kita juga sering ada latihan bareng OPD-OPD Bantul itu.”

**2) Terdapat rencana aksi untuk tanggap darurat**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “sudah ada. Dulu juga pernah ada BNPB pusat, BPBD DIY, dan BPBD Bantul tuh Namanya ekspedisi tsunami, jadi dari kabupaten pantai di timur Pulau Jawa sampai kabupaten paling barat Pulau Jawa itu dilewati ekspedisi tsunami tahun 2019. Nah Kabupaten Bantul kan dilewati itu yang di daerah Parangtritis. Itu juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kalau tsunami ada. Kan kita ke SD, ke berbagai macam elemen, ke pasar, ke sekolah, ke masjid, untuk mensosialisasikan kalau terjadi tsunami itu seperti apa. Itu dinilai sama BNPB.”

**3) Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “untuk alokasi dana, terus terang karena Covid ya mbak itu banyak sekali yang dipangkas. Jadi misal kita melaksanakan pelatihan untuk SD, kan ada yang Namanya SSB, Sekolah Siaga Bencana. Kita meningkatkan kapasitas dengan pelatihan itu ternyata anggarannya dipotong lalu dialihkan untuk Covid. Jadi terus terang anggaran untuk

kesiapsiagaan ini ada, tapi tidak sebanyak yang direncanakan sejak awal.”

**4) Terdapat kebijakan lain yang mendukung kesiapsiagaan seperti RTRW, Renstra, IMB, SNI**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “kita ada renstra, kalau kebijakan lain itu ada di Bappeda.”

**5) Terdapat peraturan terkait organisasi pengelola bencana dan prosedur tetap pelaksanaan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada Perda yang mengatur itu, nanti mbak cek di google itu pasti ada.”

**6) Terdapat peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada, kan dari BNPB juga punya pedoman untuk tempat evakuasi, jalur evakuasi tuh ada.”

**7) Terdapat peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat) dan protap pelaksanaan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada, itu menjadi tugas dari Seksi Logistik juga.”

**8) Terdapat peraturan terkait sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada, bisa dicek di *website* kami mbak.”

**c. Rencana Tanggap Darurat**

**1) Tersedianya organisasi pengelola bencana**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada, disini memang khusus untuk bencana.”

**2) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada, sudah ada dan sudah jelas, masing-masing bidang sudah dibentuk dan memiliki tupoksi masing-masing.”

**Pusdalops:** “tiap regu piket ada yang bertanggung jawab sebagai *leader*, misal terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami itu sudah ada bagian sendiri. Jadi *leader* nanti akan menunjuk anggotanya, misal memegang radio komunikasi, mengamati EWS dari BMKG, sebagai operator BISS. Jadi ada tupoksi sendiri-sendiri”

**3) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “jadi kalau di Parangtritis ini ada Bulak Mabul yang dijadikan tempat untuk evakuasi. Jadi disitu ada berbagai macam bukit buat ngungsi, kalau dari pantai kesini tuh ya cuma 2-3 km aja. Terus dideket Bulak Mabul itu juga ada tempat evakuasi lain Namanya Syekh Belabelu. Tapi yang paling dekat ke pantai ya Bulak Mabul itu. Dulu pernah ada lomba, jadi kita menentukan lari dari pantai ke Bulak Mabul itu butuh berapa menit itu di lombakan. Nah pemenangnya itu katanya anak SMP, anak SMP kan masih kuat ya. Beda sama lansia, mungkin kalau lansia itu harus digendong.”

**4) Tersedia peta bahaya tsunami dan peta evakuasi**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada di Pusdalops, nanti saya antar kesana”

**5) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “rambu ada, tapi banyak yang udah jelek juga.”

**6) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Nah kalau untuk ke wisatawan kan mereka hanya sesekali aja datangnya, jadi sulit kalau harus sosialisasi ke wisatawan tentang rambu-rambu itu. Tapi kalau warga situ pasti tau. Ada rambu tempat evakuasi harus kemana gitu tau. Kalau wisatawan kan tujuan mereka ke pantai untuk berwisata. Paling kalau ada kegiatan kayak ekspedisi tsunami itu loh mbak, itu kan juga ada kegiatan yang melibatkan wisatawan. Tapi itu kan jarang sekali diadakan. Kalau secara umum kita jadwalkan itu sulit.”

**7) Tersedia posko bencana dan protap pelaksanaan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “kalau posko itu dibentuk kalau sudah terjadi bencana, nah kalau terjadi tsunami nantinya posko akan dibentuk ada di Kantor Kapanewon Kretek biasanya.”

**8) Tersedia nomor hotline informasi bencana**

**Pusdalops:** “ada, bisa hubungi 112 untuk panggilan darurat atau bisa juga ke line telepon atau wa di nomor 02746462100.”

**9) Tersedia rencana untuk pertolongan pertama korban (obat-obatan, tenaga medis, peralatan/ambulan)**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “itu tugas dari Seksi Tanggap Darurat.”

**10) Tersedia unit SAR dan protap**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada, kita jalin relasi juga dengan SAR. Kalau terjadi gempa, kemarin kami simulasikan kalau terjadi gempa berpotensi tsunami itu ada SAR yang ke tempat TEA yang lebih tinggi tinggi untuk lihat pasang surutnya air laut. Nanti kalau ada tanda-tanda mereka akan informasikan ke Pusdalops, seperti itu.”

**11) Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)**

**Kasi Kesiapsiagaan:** Ada, kita punya peralatan dan ada datanya juga berapa yang kondisi baik dan berapa yang rusak.

**12) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada latihan yang kemarin itu kita mengadakan gladi untuk tsunami. Jadi kita mengadakan pelatihan, kemudian disusun skenarionya oleh Pusdalops nah nanti dikoordinir sama Pusdalops. Gladi kemarin itu peserta dibatasi karena Covid, paling kalau dari masyarakat itu diwakili oleh FPRB. Nah kalau 2019 itu kita ngadain gladi ada yang melibatkan masyarakat juga. Jadi di malam sebelum gladi itu udah disosialisasiin siapa masyarakat yang berperan sebagai korban yang terluka berapa orang, meninggal berapa orang, titik kumpulnya dimana, lari kemana, itu diberitahukan malamnya. tapi pelatihan ini ga rutin. Tergantung dari anggaran dananya ada atau tidak.”

**d. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “tidak ada, karena belum pernah alami tsunami juga.”

**2) Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Kita dapat bantuan dari Jepang mbak, untuk di dekat pantai itu ada alat kayak radar gitu kecil-kecil tapi banyak. Jadi dia yang nanti bisa mendeteksi adanya tsunami berapa detik atau menit sebelum sampai ke pantai. Alat ini beda sama buoy, jadi radar ini ada di daratan. Posisinya di samping pantai itu ada jalan, nah disebelah jalan itu radarnya diletakan.”

**3) Terdapat instalasi peralatan untuk peringatan bencana**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “ada, itu untuk instalasi dari pihak BMKG mbak”

**4) Terdapat prosedur pemeliharaan sistem peringatan bencana**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “bagian pemeliharaan juga biasanya BMKG”

**5) Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “kalau terjadi gempa itu nanti informasinya dari BMKG ke Pusdalops, Pusdalops menyiarkan lewat media yang dia punya bisa lewat Handphone, Whatsapp, Telepon, HT dan sebagainya. Disepanjang pantai kita punya sirine yang dihubungkan ke masjid. Jadi ketika sirine dibunyikan, warga bisa tau dan langsung lari ke tempat yang lebih aman, tempat yang lebih tinggi.”

**Pusdalops:** “jadi untuk informasi pertama tuh memang kita dari BMKG untuk pengambilan keputusan. Setelah ada gempa yang dirasakan masyarakat dan itu dirasakan juga di Kabupaten Bantul, kita menunggu informasi resmi dari BMKG mungkin sekitar 3-5 menit, itu dari alat BMKG yang ada di tempat kami itu sudah mendapatkan informasi tersebut, harus mengambil tindakan atau tidak. Kalau ada ancaman tsunami nanti kita menggunakan sistem peringatan dini tsunami yang ada di Pusdalops, itu ada yang dari Pemda dan ada yang dari BMKG. Itu ada dua sistem, yang dari Pemda itu ada di semua pesisir pantai di Kabupaten Bantul, itu ada di masjid-masjid. Saat ini sedang diaplikasikan oleh nasional untuk sistem peringatan dini tersebut, sebagai percontohan Kabupaten Bantul. Setelah gempa tahun 2006, itu kita langsung mengadakan pengadaan

alat tersebut mbak. Waktu itu yang rintis alatnya namanya Pak Ayub dari Wonokromo. Alatnya Namanya *Bantul Integrated Siren System*, BISS. Nah di masjid-masjid sepanjang pantai itu kita titipi alat, jadi bisa digunakan untuk adzan dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita berbicara *voice* di Pusdalops Bantul, itu disana juga akan mengeluarkan suara yang akan ditangkap oleh alat yang ada disana, bentuknya seperti ada radionya gitu mbak. Setiap bulan kita juga uji coba bunyikan sirine tiap tanggal 26. Kalau lancar tidak ada gangguan, penyebaran informasi itu bisa cepat. Nah gangguannya itu bisa mati listrik, alatnya ada yang dicuri. Jadi kesadaran masyarakat masih ada yang rendah juga. Kalau missal listriknya mati, kita ada mitra kerja di kelurahan-kelurahan, disitu juga ada relawan-relawan FPRB yang sudah dibekali perangkat radio HT. Kalau listrik mati, alat komunikasi tidak ada, kami menggunakan radio komunikasi.

**6) Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “dulu sih tidak ada, karena tsunami itu kan tidak menjadi *issue*. Tapi setelah ada kajian tentang potensi tsunami disini barulah diberikan pelatihan-pelatihan ke staf BPBD.”

**e. Mobilisasi Sumber Daya**

**1) Terdapat kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Ada. Kalau alat ya pake alat-alat dia sendiri. Ga mensubsidi instansi lain. Misalnya alat BPBD ya BPBD tanggung jawab terhadap alat yang dimiliki BPBD. Tapi saling mendukung antar instansi.”

**2) Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Ada itu, mereka sudah tau juga rambu-rambunya jadi mereka udah tau udah hafal. Kalau wisatawan agak sulit ya karena mereka cuma sesaat.”

**3) Tersedia mekanisme untuk mengelola sumber daya dari luar (pihak swasta, donator, NGO, relawan)**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Ada. Kalau yang saya tau ya mbak, itu kayak radar tsunami tuh ada. Jadi ada perjanjian dan ada MOUnya. Tapi itu... jadi gini mbak, itu kan perlu tanah untuk membangun. Itu kan tanahnya punya kraton, jadi yang ngurus izin bisa digunakan jadi tempat untuk membangun antena-antena atau radar itu kita izin ke kraton. Tapi nanti setelah itu jadi diserahkan ke AP, administrasi pembangunan. Jadi mungkin nanti dijadikan aset atau gimana saya kurang tau ya, asetnya pemda. Jadi nanti otomatis itu akan diurus oleh pemda.”

**4) Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Kemarin sih pas gladi, jika terjadi bencana itu dari bupati nanti akan melimpahkan ke dandim atau kapolsek gitu mbak. Nah nanti diserahkan lagi ke Pusdalops. Tapi tetep koordinasi antara Pusdalops dengan dandim dan kapolsek. Komando utamanya nanti di Pusdalops supaya ga tumpang tindih.”

**5) Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “yang koordinasi nanti Pusdalops.”

**Pusdalops:** “ada, seperti yang tadi saya jelaskan itu informasi dari BMKG lalu diterima oleh pusdalops, nanti baru dikoordinasikan ke instansi-instansi lainnya.”

**6) Tersedia protokol untuk komunikasi publik yang berkaitan dengan informasi keadaan darurat (secara regular dan bertanggung jawab)**

**Pusdalops:** “ada, selain itu setiap bulan itu kita bunyikan sirine juga supaya melatih masyarakat juga agar mereka tau fungsi sirine itu untuk apa.”

**7) Tersedia jaringan kerja di luar pemerintah untuk memobilisasi sektor swasta dan NGO dalam merespon keadaan darurat bencana**

**Pusdalops:** Kalau terjadi bencana, ada dari Bupati nanti memberikan perintah mengadakan rapat, disitu terlihat kalau ada butuh apa saja yang siap menyediakan siapa itu nanti ada. Jaringan kerjanya sudah ada.

**8) Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Kalau kita menghadapinya secara umum mbak, jadi bukan cuma tsunami tapi semuanya. Semuanya kita latih, jadi kita siap untuk menghadapi. Termasuk covid yang awal dulu mbak, njenengan kalau tau di Bantul itu kita sempat kewalahan loh mbak untuk nyemprot, jadi kan misal ada yang positif ya kan lapornya kesini. Misalnya di Bantul kan ada 75 desa, kalau satu hari itu ada laporan di beberapa titik, kita kewalahan untuk membaginya mbak. Makanya waktu itu kita segera mengambil keputusan melatih di tiap desa. Awalnya satu desa itu hanya diwakili lima orang, dikumpulkan di satu titik. Jadi kita ga ke desa-desa tuh enggak, tapi di satu lokasi untuk beberapa desa, kita latih disitu. Itu kan awal juli ya, trus September itu satu desa diwakili 15 orang. Karena kalau kita yang terjun sendiri kewalahan mbak. Kita meningkatkan kapasitas masyarakat desa tuh ya lewat FPRB. Makanya kita bener-bener kita bantu, kita latih. Intinya kita latih yang FPRB

itu, karena yang nanti menghadapi lebih dekat secara langsung itu ya temen-temen FPRB bukan kita. Kita datang paling udah beberapa jam kemudian, yang disanakan lebih berdekatan bisa langsung nolong.”

**9) Telah teridentifikasi jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pada saat darurat bencana**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Kalau kita sih cuma mengantisipasi gelombang tsunaminya, bukan pangannya. Kalau tanaman paling tanaman bakau, kita udah tanam di dekat Pantai Saman namanya Pantai Baros ya untuk menghadapi gelombang tsunami itu. Tapi kalau pangan, saya kira kita belum sejauh itu mikirnya. Entah ya kalau dinas pertanian saya gak tau. Kalau dari BPBD tidak sejauh itu.”

**10) Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Gini mbak, ada kegiatan yang FPRB mengundang kita, kita latih. Kalau dulu kita yang ada anggaran, kita yang latih. Tapi sekarang karena covid toh mbak, anggarankan otomatis difokusin jadi gaada. Jadi tahun-tahun ini lebih banyak dari desa minta kita untuk pelatihan, bukan kita. Kita hanya melatih gitu.”

**11) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Kita lebih seringnya tatap muka, maksudnya efektifnya tuh tatap muka. Jadi kita beri penjelasan nanti diberikan brosur itu kita punya. Tapi karena tsunami belum ada ya kita belum punya. Jadi karena tsunami itu belum pernah jadi jarang ya diangkat. Misalnya kayak destana, destanakan dia simulasinya itu tergantung kesepakatan warga, nanti bencana yang mau diangkat itu apa. Mayoritas

bencananya gempa bumi, karena apa? Karena mereka pernah mengalami gempa bumi dan itu dampaknya sangat besar. tapi kalau tsunami, karena dia belum pernah ngalamin ya gapernah diangkat. Karena belum ada kejadian yang besar ya kayak terabaikan.”

**12) Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “masyarakat sudah, wisatawan belum.”

**13) Tersedia informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi**

**Pusdalops:** “dulu kami punya aplikasi mbak, jadi aplikasi pelaporan bencana namanya PASEBAN Bantul. Mungkin karena kurang familiar jadi sekarang tidak bisa diakses. Tapi untuk data, tiap ada kejadian itu Pusdalops merekap tapi tidak untuk di publikasikan. Namun semisal dari akademisi ingin meminta dengan bawa surat tugas seperti ini bisa dikeluarkan.”

**14) Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Kalau itu ada. Jadi ni saya cerita ya, kita itu di anggaran perubahan dititipi anggaran dari DPRD. Jadi DPRD itu istilahnya titip anggaran, untuk sosialisasi 43 kali, untuk pelatihan itu 15 kali. Tapi itu, misalnya kita mitra kerjanya dengan komisi A ya, itu mayoritas yang naro kegiatan tuh komisi A. jadi ntar yang nentukan lokasi kegiatan itu ya anggota dewan. Nah itu kita dapat anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan. Malah itu kita ga kira-kira, itu kan anggaran anggota dewan ditaro di BPBD.”

**15) Tersedia rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Kalau itu, kita laksanakan kegiatan, tapi evaluasi itu tidak dijelaskan secara mendalam. Jadi kita Cuma

ngobrol kayak gini aja mbak. Jadi setelah kegiatan itu nanti ada evaluasi dari pendamping itu langsung ke pesertanya yang ikut kesitu. Ada dalam bentuk laporannya tapi tidak sedetil evaluasi langsung, paling hanya gambaran-gambaran umum. Kalau evaluasi kan langsung dibahas kurang apa-kurang apa.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Sumber Daya Manusianya sih, karena semua sudah di latih.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Dana dan waktu. Misalnya kayak tadi ada 43 kali sosialisasi, 15 kali pelatihan. Nah inikan udah akhir tahun jadi mepet toh waktunya. Kalau waktunya mepet kan kita juga jadi gabisa maksimal. Nah kalau dana itu kan dialihkan karena covid.”

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Kasi Kesiapsiagaan:** “Ya ada, kita minta paling nggak anggarannya di tambah 10% dari tahun sebelumnya sama nambah SDM. Jadi gini mbak, ni saya cerita umum ya. Di BPBD inikan ada sekretariat, ada bidang 1, ada bidang 2, dan bidang 3, trus ada pemadam kebakaran, trus ada tim reaksi cepat atau TRC, dan ada pusdalops. Nah itu damkar, TRC, dan pusdalops yang sering ada penambahan SDM. Kalau sekretariat, bidang 1, 2, 3 itu jarang sekali ada penambahan SDM.”

### 3. PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul (8 November 2021)

#### a. Pengetahuan

##### 1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan

“kalau dampak tsunami ya kerugian yang pertama itu pasti material seperti rumah yang ada di sekitar pantai. Kemudian masyarakat yang ada di sana juga terdampak. Kalau di dekat Pantai Samas situ ada buat mitigasi tsunami tapi kalau di Pantai Parangtritis itu belum ada. Tapi kalau untuk *Early Warning System* untuk tsunami itu sudah ada di sepanjang pantai selatan termasuk di Parangtritis ada. Ada yang dari BPBD, ada yang dari kelompok kayak LSM tuh ada untuk EWS.

##### 2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana

“saya kurang tau kalau tipe-tipe tsunami, tapi kalau skenarionya misal terjadi tsunami itu didahului oleh gempa bumi toh, tiba-tiba tsunami tuh kan enggak. Jadi ada tanda-tandanya. Kayak dari BPBD itu kan juga pasti sering ngadain sosialisasi ke masyarakat sekitar pantai dengan adanya potensi tsunami di sana. Kemudian tentuyakan dengan adanya EWS yang kita tanam di beberapa pantai tadi bekerja. Kan ada FPRB di masing-masing desa untuk siaga disana, jadi kalau sewaktu-waktu misal terjadi bencana tsunami sudah siap untuk mengevakuasi”

##### 3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami

“kalau itu... ya tidak semua rentan, karena disana menjadi wilayah yang berpotensi tsunami otomatis kesiapsiagaan masyarakat sudah tinggi. Tapi yang namanya bencana kan bisa datang sewaktu-waktu ya mbak, walaupun kita sudah adakan mitigasi, sudah adakan gladi bencana tsunami, dan sebagainya

tapi begitu bencana benar-benar terjadi, kondisi masing-masing berbeda. Tentunya tadi kelompok-kelompok rentan yang kita cover terlebih dahulu, misalnya nanti banyak yang tua atau sakit, mereka yang akan diselamatkan terlebih dahulu.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

“kalau terkait kesiapsiagaan ini ya mbak, tentunya sudah ada kajian dari BPBD, termasuk nanti pemasangan jalur evakuasi misalnya lewat mana gitu kan sudah ada disana.”

**b. Kebijakan**

**1) Tersedianya kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola bencana**

“ada kalau itu, tentang pembentukan BPBD Bantul.”

**2) Terdapat rencana aksi untuk tanggap darurat**

“ini harusnya di BPBD ada ya, tapi saya kurang paham”

**3) Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana**

“ada, karena bencana termasuk ke standar pelayanan minimum ya mbak, jadi alokasi dana itu sudah kita siapkan. Jadi kalau nanti terjadi yang namanya darurat, kita juga ada dana darurat. Tapi dana itu yang dikeluarkan Pak Bupati nanti.”

**4) Terdapat kebijakan lain yang mendukung kesiapsiagaan seperti RTRW, Renstra, IMB, SNI**

“kalau dari Bappeda, kita ada RPJMD, ini mencakup semua termasuk BPBD, kemudian BPBD itu nanti mengeluarkan Renstra BPBD yang mengacu ke RPJMD. Kalau di RPJMD itu kan ada lima misi mbak, nah yang terkait dengan bencana itu misi ke empat. Jadi kebijakannya akan mengikuti misi yang ke empat itu dalam RPJMD. Kemudian dari Dinas Tata Ruang ada RTRW nah didalamnya juga nanti ada izin mendirikan bangunan.”

**5) Terdapat peraturan terkait organisasi pengelola bencana dan prosedur tetap pelaksanaan**

“ada, itu tadi yang saya bilang. Perda tentang pembentukan BPBD.”

**6) Terdapat peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi**

“itu kita membuat lokasi gedung itu kan kita cocokkan dengan rencana tata ruangnya mbak. Walaupun itu pemerintah yang bangun untuk fasilitas umum, itu tetap harus mengacu ke RTRWnya.”

**c. Rencana Tanggap Darurat**

**1) Tersedianya divisi pengelola bencana**

“ada mbak, kami yang masih berhubungan dengan bencana meskipun tidak secara langsung ya.”

**2) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

“ada. Kalau dari Bappeda sendiri, biasanya ngikut aja sih mbak. Kalau di Bappeda ada kendali operasi. Nah BPBD itu ada di bidang Sarpras, nah sub bidangnya KPPSDA. Kalau secara langsung pembagiannya tidak ada, tapi kita memastikan bahwa anggarannya sudah benar-benar ada di BPBD, seperti itu.”

**3) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian**

“ada mbak di Bulak Mabul.”

**4) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

“sudah ada di sekitar pantai. Rambu tanda bahaya itu juga banyak ditematkannya jadi pasti siapapun yang ke pantai bisa terlihat.”

**5) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

“seperti yang tadi saya jelaskan mbak, itu termasuk dalam standar pelayanan minimal. Jadi tanda bencana seperti apa, harus berlari kemana, itu harus sudah disosialisasikan ke masyarakat di sekitar pantai itu.”

**d. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan**

“ada mbak, itu bentuknya kayak sirine. Dipasangnyanya di masjid-masjid biasanya.”

**2) Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf**

“karena di Kabupaten Bantul itu kan hampir semua jenis bencana ada di Kabupaten Bantul mbak, ada tsunami, tanah longsor, angin kencang tuh ada semua. Jadi memang suka diadakan pelatihan atau gladi untuk personil-personil di setiap instansi. Tapi kalau di Bappeda biasanya kita diundang sama BPBD kalau ada latihan atau simulasi gitu, karena kita sebagai yang memonitoring perencanaannya. Semua kegiatan yang ada di OPD itu selalu melibatkan Bappeda, tapi secara teknis pelaksanaan kegiatan itu ada di BPBD kalau masalah kebencanaan. Kalau pelatihan atau gladi itu ga rutin sih mbak, paling berapa tahun sekali. Mungkin karena pandemi juga jadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang dihentikan sementara.”

**e. Mobilisasi Sumber Daya**

**1) Terdapat kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan**

“jadi biasanya kalau bencana nanti ketuanya dari Bupati, kemudian Bupati menunjuk pelaksana untuk penanganan bencana itu BPBD, jadi BPBD yang mengepalai dan mengkoordinasikan instansi lainnya.”

**2) Telah teridentifikasi jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pada saat darurat bencana**

“kalau misalnya terjadi bencana kan bantuan ada banyak ya mbak, kalau identifikasi tanaman itu belum ada sih mbak.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“SDM sih mbak, kemudian sarpras. SDM saat ini sudah siap karena sudah ada FPRB yang sering dilatih dan memberi pelatihan ke masyarakat. Kalau sarana dan prasarana juga sudah memadai seperti tempat evakuasi sementara sudah ada, EWS masih berfungsi dengan baik juga.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“biasanya sih koordinasi mbak. Karena pada saat terjadi bencana itukan istilahnya tidak bisa langsung sesuai rencana. Padahal sebelumnya sudah gladi, tapi begitu terjadi bencana pasti koordinasi ada aja yang kurang dan terlewat. Kadang kalau kita nunggu koordinasi dulu juga kondisi masyarakatnya kadang tidak langsung tertangani jadinya. Trus biasanya di

lapangan sering terjadi tumpang tindih dan cenderung masing-masing misalnya Dinsos jalan sendiri, BPBD jalan sendiri gitu.”

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“upaya yang dilakukan paling pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan, biasanya pelatihan itu melibatkan BPBD, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, dan lain-lain. Karena itu kan tidak hanya BPBD yang menangani kalau terjadi bencana. Cuma masalahnya kalau yang diundang pelatihan itu kan levelnya pelaksana bukan pengambil kebijakan, jadi koordinasinya tidak bisa langsung. Karena yang mengetahui biasanya stafnya bukan kepala-kepalanya yang biasa mengambil keputusan. Biasanya yang diundang sih memang kepala, tapi karena kepala biasanya banyak kesibukan, jadi yang ditugaskan datang tuh staf.”

**4. Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul (10 November 2021)**

**a. Pengetahuan**

**1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

“Jadi seandainya ada tsunami, tentu yang paling kena dampaknya adalah para pelaku wisata atau masyarakat yang berada di lokasi pantai. Disitu ada para pedagang, para penjual jasa, lalu juga nanti para tukang parkir disitu, lalu pedagang asongan, itu yang paling terdampak disitu. Selain itu ya wisatawannya juga akan terdampak, dan jika terjadi tsunami objek wisata itu akan sepi.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

“belum paham mbak, paling kalau penyebab ya dari gempa ya.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

“di sekitar pantai itu pasti sudah tau risiko apa saja yang kemungkinan akan dihadapi, termasuk kemungkinan tsunami. Mereka pasti sudah tahu walaupun beberapa kali ada ramalan besok akan terjadi tsunami yang besar, walaupun sampai sekarang belum ada, ya semoga tidak terjadi seperti itu, tapi saya kira warga sudah tahu risikonya.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

“BPBD itu punya shelter, kalau terjadi bencana misal tsunami, itu ada nanti paling digunakan shelter tersebut. kalau dari Dinas Pariwisata sih tidak ada ya mbak, paling kita hanya memasang papan-papan peringatan seperti itu. Karena yang terkait bencana khususnya tsunami itu kan sudah ada BPBD yang membidangi. Tetapi di pantai sudah ada petugas SAR, bahkan kita sudah punya gedung yang permanen dengan personil yang cukup banyak dan dengan SDM yang sudah terlatih.”

**b. Rencana Tanggap Darurat**

**1) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

”selama ini sih tidak ada mbak, kita juga tidak pernah mengantisipasi untuk tsunami ya.”

**2) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

“kita membuat rambu-rambu tanda bahaya yang seperti dilarang mandi di laut, awas ubur-ubur, untuk senantiasa menjaga prokes, itu saja. Kalau evakuasi dibuat oleh BPBD biasanya.”

**3) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

“itu... kalau di Dinpar belum ada rencana seperti itu ya, kecuali kalau nanti kita diajak atau digandeng oleh BPBD, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan BPBD untuk mensosialisasikan hal tersebut ke masyarakat atau wisatawan.”

**4) Tersedia posko bencana dan protap pelaksanaan**

“ada posko terpadu di Pantai Parangtritis.”

**5) Tersedia nomor hotline informasi bencana**

“di Pantai Parangtritis itu ada posko terpadu parangtritis, awalnya itu berdiri ketika masa pandemi. Tujuannya untuk memberikan informasi ke masyarakat dalam hal ini untuk senantiasa menjaga proses. Disitu kita juga pasang nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”

**6) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

“kalau tsunami tidak ada. Karena banyak destinasi wisata air ya, jadi kita memberikan pelatihan ke pengelola untuk menjaga keselamatan wisatawan ketika mereka harus naik perahu seperti apa, kita ada pelatihan untuk pelaku wisata. Tapi kalau khusus tsunami itu belum ada, hanya laka air saja.”

**c. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan**

“di dekat pantai itu ada seperti pengeras suara, nah nanti kalau ada bencana mungkin bisa disiarkan dengan alat itu.”

**d. Mobilisasi Sumber Daya****1) Terdapat kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan**

“pasti ada sinergitas antar instansi untuk sama-sama menangani permasalahan yang timbul akibat bencana itu.”

**2) Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana**

“tingkat pemerintah itukan dari atas sampai bawah, bawah itu bisa RT, bisa Lurah. Nah mereka yang berhadapan langsung sama masyarakat. Mereka yang bisa memberitahu masyarakat misal suatu saat ada sesuatu yang perlu dihindari misalnya harus kemana, harus berbuat apa, itu pemerintah paling bawah yang lebih intens untuk berkomunikasi dengan masyarakat.”

**3) Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah**

“sudah lama tidak ada koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan BPBD, tapi dulu pernah ada koordinasi terkait dengan kebencanaan. Bahkan BPBD itu membangun semacam alat di dekat pantai yang seperti tiang-tiang banyak itu saya kurang tahu namanya apa, tapi yang saya dengar itu terkait dengan tsunami, EWS semacam itu. Paling yang melibatkan kami itu hanya terkait pembukaan destinasi wisata di masa pandemi. Kita beberapa kali diminta menjadi narasumber, tapi tidak khusus untuk tsunami. Jadi kan ini pandemi, banya tempat wisata yang ditutup. Sekarang sudah level 2 jadi, sudah ada tempat wisata yang bisa dibuka. Nah kemarin BPBD menggandeng kita untuk menjadi narasumber terkait pembukaan tempat wisata itu. Kita sudah tiga kali diajak mereka dalam waktu dua bulan ini.”

**4) Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat/pedagang/pelaku wisata**

“kalau dari Dinas Pariwisata tidak ada.”

**5) Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan**

“secara khusus, dinas pariwisata tidak memberikan sosialisasi terkait kesiapsiagaan bencana. Secara khusus tsunami itu tidak ada. Tapi kalau secara umum, seperti kalau di pantai itu ada beberapa risiko laka air yang bisa terjadi itu kita sampaikan.”

**e. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“kita perlu lebih meningkatkan sinergitas ataupun koordinasi dengan instansi yang secara teknis menangani masalah kebencanaan, yaitu BPBD. Kita juga perlu menggandeng relawan SAR karena mereka yang selalu ada di lokasi, 24 jam mereka yang bisa tahu kondisi dan situasi di lapangan seperti apa, kita juga harus lebih intens lagi mensosialisasi warga masyarakat yang utamanya ada di sekitar pantai untuk bisa memahami tanda-tanda tsunami itu apa, lalu misal terjadi apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan, seperti itu. Kita sudah mendirikan posko terpadu parangtritis, isinya itu dari berbagai instansi ada relawan, PMI, kepolisian, pol air, satpol pp disitu ada komunikasi yang terjalin. Bisa saling tukar informasi, bisa sharing pengalaman”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“anggaran ya pasti, jadi tidak bisa leluasa untuk berkoordinasi.”

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“jumlah kegiatan atau pertemuan itu biasanya jadi dikurangi karena anggarannya sangat terbatas.”

**5. Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (19 November 2021)**

**a. Pengetahuan**

**1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

“saya jawab berdasarkan sudut pandang kesehatan ya, dampaknya tuh untuk kesehatan saat terjadi tsunami yang pertama pasti akan ada orang terluka, orang terjatuh, kemudian ketika disatukan di pengungsian akan muncul penyakit-penyakit seperti diare, batuk pilek, dan pastinya ibu hamil, balita, lansia itu perlu penanganan khusus.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

“ada gempa, terus air surut, terus tiba-tiba ada gelombang besar seperti itu. Nah penyebabnya apa jugakan saya tidak tahu, penyebab yang bisa menyebabkan tsunami apa itu saya tidak tahu karena itu alam.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

“karena mereka *stress* di pengungsian, otomatis daya tahan tubuh sangat menurun. Jadi macam-macam penyakit tuh bisa terjadi disitu karena mungkin dia kumpul orang banyak, kebersihan kurang, jadi untuk terjadi diare itu lebih tinggi potensinya.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

“kita sudah punya Tim Kaji Cepat, jadi misal terjadi bencana di Parangtritis, ujung tombak Dinas Kesehatan ke Puskesmas, apabila Puskesmas sudah mampu melayani, kita serahkan ke Puskesmas. Tapi kalau terjadi tsunami yang besar banget, kemungkinan disana juga lumpuh, kita punya kayak regional. Jadi faskes terdekat itu nantinya bisa membantu memberikan pelayanan kesehatan.”

**b. Kebijakan**

**1) Terdapat peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat) dan protap pelaksanaan**

“ada, kita sudah punya tim tadi. Misal terjadi bencana kita sudah punya. Misalnya bagian farmasi dia menyediakan obat, bagian umum yang menyediakan sarprasnya, kayak SDM juga menyediakan tenaganya siapa yang mau dikirim, siapa yang melakukan A B C.”

**c. Rencana Tanggap Darurat**

**1) Tersedianya divisi pengelola bencana**

“kita ada TKC atau Tim Kaji Cepat yang tadi saya bilang, nanti mereka yang nilai dan laporkan apa saja yang mereka butuhkan. Bisa koordinasi juga dengan bidang farmasi, lalu bidang umum, dan SDM kayak yang tadi saya jelaskan mbak.”

**2) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

“ada, kayak yang tadi saya bilang itu. Sudah ada bagian-bagiannya yang menyediakan sarpras siapa, obat siapa, itu udah masing-masing.”

**3) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian**

“ada itu biasanya BPBD yang sudah berkoordinasi untuk menyediakan tempat.”

**4) Tersedia posko bencana dan protap pelaksanaan**

“kalau posko itu biasanya dari TNI/Polri, nah di posko itu ada beberapa *cluster*, kayak *cluster* Kesehatan, *cluster* sosial, *cluster* layanan air bersih.”

**5) Tersedia rencana untuk pertolongan pertama korban (obat-obatan, tenaga medis, peralatan/ambulan)**

“ini kami serahkan ke puskesmas terlebih dahulu.”

**6) Tersedia data alokasi bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar**

“untuk kesehatan, kita ada obat untuk bencana. Misal terjadi bencana, kita kan gatau bencananya apa. Karena di Bantul itu banyak sekali bencana, bencana apa saja bisa terjadi di Bantul. Jadi kita lihat misal terjadi banjir otomatis setelah banjir kita mengantar obat darurat. Tapi bukan dari Dinkes antar kesana, tapi kita lihat wilayah tadi. Kalau cuma sedesa berarti puskesmas saja sudah cukup.”

**7) Terdapat daftar tempat penyimpanan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar**

“ada, di gudang farmasi.”

**8) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

“kita selalu ikut kalau ada pelatiha, gladi lapangan, atau apa itu yang diadakan BPBD dan kita selalu datang. Tapi yang kemarin ikut gladi itu bukan saya, tapi setau saya ya biasanya kalau simulasi bencana itu suka melibatkan warga jadi sekalian mengedukasi warga.”

**d. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf**

“sudah, kita semua sudah dapat pelatihan itu.”

**e. Mobilisasi Sumber Daya****1) Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah**

“ada, biasanya kita juga pake HT kalau sinyal tidak bagus. Tapi dalam keadaan biasa kita pake HP aja di grup WA.”

**2) Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat**

“sudah ada.”

**3) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

“BPBD itu punya kayak brosur yang dibagikan ke masyarakat kalau sedang melakukan sosialisasi.”

**4) Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana**

“ada, itu ada.”

**5) Tersedia rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev**

“kita selalu monev, karena kita ranahnya Kesehatan, kita monevnya ke Puskesmas untuk bagaimana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, setiap tahun selalu kita adakan monev itu.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat****1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“yang mendukung karena masing-masing OPD itu sudah satu komitmen untuk penanganan bencana.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“karena kemungkinan masyarakat ada yang belum tahu tentang bencana ini. Di sekitar pantai itu kan banyak sekali dipasang alat-alat untuk mendeteksi ya mbak, nyatanya malah dirusak. Kesadarannya masih ada yang kurang.”

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“paling sosialisasi ke masyarakat, melakukan gladi lapangan, itu aja sih.”

**6. Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul (15 November 2021)**

**a. Pengetahuan**

**1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

“dampak yang bisa ditimbulkan adalah ketika di Pantai Parangtritis jika terjadi tsunami yang jelas akan merusak infrastruktur yang ada di wilayah Pantai Parangtritis sampai sepanjang ke barat, ada beberapa pantai itu ada Pantai Samas, Depok, sampai ke Parangkusumo. Nah pantai-pantai itu ada di tiga kecamatan, ada Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan. Kalau terjadi tsunami, sudah pasti tiga kecamatan ini akan terkena dampaknya yaitu infrastrukturnya pasti akan rusak semua. Dampak berikutnya jelas akan berdampak ke masyarakat yang ada di sekitar situ dan ketika itu terjadi, dari hasil kajian yang kita lakukan dengan BPBD, itu bisa sampai radius sekitar 3km dari bibir pantai. Itupun sebenarnya berbeda-beda ya mbak, kalau di Parangtritis

sampai radius sekitar 3km, kalau di wilayah barat beda lagi radiusnya.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

“penyebabnya karena ya tidak dipungkiri, bahwa kita di Pulau Jawa ini memang ada di wilayah *ring of fire*, dan kita juga ada pertemuan lempeng bumi ya antara Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-Australia jadi mau tidak mau disitu potensi gempanya memang tinggi sekali. Kalau tipe dan skala bencana itukan juga dipengaruhi sama skala gempa yang ditimbulkan. Tapi permasalahannya itu, titik gempa yang terjadi di kita itu memang banyak yang ada di laut, tapi kita juga harus memperhatikan titik gempa yang ada di darat. Memang kalau gempa di darat tidak menimbulkan tsunami, tapi kita tetap harus waspada.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

“alhamdulillah masyarakat kita di Kabupaten Bantul ini sudah dapat pengetahuan dari pengalaman tsunami 2006 disini, dan yang ada di Aceh. Jadi selama ini kita sudah melakukan mitigasi bencana terus. Bulan Oktober kemarin di Hari Kesiapsiagaan Bencana kita sudah melakukan simulasi dari berbagai elemen masyarakat disekitar pantai. Jadi kita melakukan *drill* dan alhamdulillah untuk masyarakat kita itu sudah mulai baik dan mulai terbiasa. Untuk mengantisipasi itu juga, kita sudah meletakkan EWS yang ada di setiap pantai selatan dari wilayah barat sampai dengan timur, dari Pantai Parangtritis sampai dengan Pantai Parangkusumo. Itu sudah disinergikan dengan masyarakat juga, jadi kerentanan masyarakatnya itu sudah lumayan bisa ditekan.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

“ini baru direncanakan untuk membangun tempat pengungsian sementara, karena saat ini belum ada tempat pengungsian sementara kalau terjadi tsunami. Kita cuma memanfaatkan temen-temen relawan desa ya FPRB itu, nah kita sudah melakukan pemetaan khususnya di wilayah Kretek ini, nantinya menjadi titik penampungan sementara yang ada di beberapa kelurahan.”

**b. Kebijakan****1) Tersedianya kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola bencana**

“ada Perdanya itu mbak.”

**2) Terdapat rencana aksi untuk tanggap darurat**

“sudah ada, itu kita jadi satu sama BPBD mbak. Rencana aksinya ada di BPBD bukan di kami, jadi kami tugasnya menjalankan apa yang dilakukan BPBD, nah kita ikut disitu.”

**3) Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana**

“ada, kita setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana. Itupun keseluruhan ya mbak, dalam arti tidak hanya untuk tsunami saja. Karena tiap tahun di Bantul ini pasti ada saja bencananya entah saat kemarau atau saat musim hujan seperti ini. Di PMI selalu menyediakan anggaran walaupun tidak banyak, karena itu dananya juga dari masyarakat. Tahun 2021 ini anggaran kita cuma 30 juta. Sumber utama PMI kan berasal dari bulan dananya masyarakat, ketika bulan dana itu kita dapatkan besar di tahun ini, otomatis anggaran untuk tahun depan bisa kita alokasikan lebih besar. Selain dari dana itu, ketika terjadi bencana kita juga membuka donasi untuk penanggulangan bencana.”

- 4) **Terdapat peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi**  
“kalau pemetaannya sudah ada, tapi memang dari kabupaten belum dibuatkan tempat khusus. Tapi ketika pengaturan titik tempat evakuasi itu semua sudah dibuat dengan baik dan sudah diberikan papan petunjuk dan sudah disosialisasikan, jadi masyarakat sudah tahu harus lari kemana.”

**c. Rencana Tanggap Darurat**

**1) Tersedianya divisi pengelola bencana**

“ada, yang pertama itu ada kami bidang penanggulangan bencana, kemudian ada bidang relawan, selanjutnya ada bidang pelayanan kesehatan dan sosial, itu yang paling berhubungan dengan kebencanaan.”

**2) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

“ada, setiap bidang sudah ada tugasnya masing-masing.”

**3) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian**

“ada mbak, ada di Bulak Mabul, trus di makam, sama di kelurahan.”

**4) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

“sudah ada dan menurut saya sudah cukup, dalam artian jumlah dan posisinya sudah cukup. Tapi paling yang kurang itu diperawatannya. Kita baru mensosialisasikan rambu itu pada tahun 2015.”

**5) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

“kalau ke masyarakat sudah, tapi kalau untuk ke wisatawan itu memang jarang ya mbak. Karena harus berkelanjutan, dan

wisatawan itu selalu berganti-ganti. Jadi kalau di wisata pantai yang paling ditekankan ya rambu-rambu bahaya dan rambu-rambu tempat evakuasi. Tapi kalau masyarakat sudah menyeluruh melalui FPRB.”

**6) Tersedia posko bencana dan protap pelaksanaan**

“kita memang ada posko, posko PMI sendiri sudah 24 jam.”

**7) Tersedia nomor hotline informasi bencana**

“*calling center* kebencanaan itu ada di Pusdalops. Jadi di BPBD Kabupaten Bantul itu sudah ada Pusat Pengendali Operasi, nanti ketika terjadi bencana masyarakat akan menghubungi sana. Kemudian BPBD yang akan menghubungi semua jejaring yang ada seperti PMI, Dinas Kesehatan, Damkar, dan sebagainya. Jadi supaya lebih sinergi.”

**8) Tersedia rencana untuk pertolongan pertama korban (obat-obatan, tenaga medis, peralatan/ambulan)**

“oh itu ada, kita di PMI walau tidak terjadi bencana kita sudah *on call* 24 jam dengan mengaktifkan posko. Posko PMI sudah 24 jam, disitu ada 1 *driver*, 2 opeator posko, sama 1 perawat tenaga medis, dan ada teman-teman piket relawan. Jadi itu untuk antisipasi tidak hanya bencana, tapi juga kalau terjadi laka lantas, orang sakit yang harus dibawa ke rumah sakit, dan keadaan-keadaan darurat lainnya. Di PMI ada bidang pelayanan kesehatan sosial masyarakat, ada bidang penanggulangan bencana juga. Nah posko ini gabungan dari penanggulangan bencana dan kesehatan yang dalam keadaan normal seperti ini dia akan menjalankan tugas masalah Kesehatan, tapi ketika terjadi bencana, posko ini akan berubah menjadi pusat komando kebencanaan. Intinya disitu, jadi tidak ada perencanaan, dalam arti itu sudah masuk

kedalam tugas kita setiap harinya jadi tidak tertulis lagi rencana-rencananya tapi sudah dijalankan setiap hari.”

**9) Tersedia rencana penyelamatan korban bencana dan transportasi/sistem ambulan**

“ohh itu, jadi kalau dikebencanaan itu, ketika penyelamatan korban kita tetap memakai aturannya adalah Triase. Jadi, Triase itu ketika terjadi bencana, yang pertama kali kita terjunkan itu tim asesmen, nanti ada beberapa kali asesmen, asesmen cepat dan asesmen lanjutan. Nah nanti dari tim asesmen itukan ada pemetaan kebutuhan dan sebagainya atau tingkat kerusakan, dengan form asesmen yang sudah ada di tempat kita, itu kita laporkan ke posko. Ketika di posko, yang dibutuhkan adalah tim evakuasi, baru kita luncurkan tim evakuasi dan hasil semua itu dari hasil asesmen dan sebagainya. Aturan di PMI memang koordinator lapangan poskonya yang koordinasi dengan BPBD Bantul itu mana saja yang sudah dilakukan asesmen oleh PMI, nah nanti akan dijadikan satu datanya di BPBD. Terus, ketika diterjunkan tim evakuasi, ketika di lapangan mereka akan melakukan Triase, nah Triase itu memprioritaskan korban yang tingkat keselamatan hidupnya lebih tinggi. Karena ketika terjadi bencana itu perbandingannya terbalik kan mbak, penolong itu akan lebih sedikit dibanding jumlah korbannya. Setelah kita menolong dengan Triase, lalu kita bawa ke tempat yang sudah disepakati, ketika terjadi bencana titik pengungsian sementara ada dimana. Nah titik itu nantinya akan didirikan posko lapangan, tim evakuasi akan merapat ke posko lapangan tersebut nantinya, jika disitu tidak mampu untuk melakukan pertolongan, maka akan kita bawa ke rumah sakit yang dirujuk. Rumah sakit-rumah sakit di Bantul yang sudah siap untuk penanganan bencana kan juga sudah

banyak, meskipun belum semuanya ya karena kan ada standarnya.”

**10) Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)**

“kalau tenda kita ada, dapur umum juga kita punya, tapi kalau MCK memang tidak ada. Biasanya kalau sesuai prosedur sih MCK di sebuah pengungsian itu memang ada ya. Ya kita contohkan tahun 2006 saja, kita bikin pengungsian di lapangan ini, dan disini MCK sulit, paling kita bikin MCK darurat saja. Jadi tidak harus kita sediakan MCK portable.”

**11) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

“iya betul, kemarin sudah dilaksanakan oleh BPBD dan melibatkan banyak instansi termasuk PMI juga ikut. Masyarakat juga biasanya dilibatkan supaya mereka paham, dan sinergi antar instansi juga dilatih. Buat latihan seperti itu sih minimal 1 tahun sekali, biasanya bulan oktober saat Hari Kesiapsiagaan Bencana. Tapi tidak selalu BPBD yang adakan, misal ada FPRB yang aktif itu mereka juga suka adakan simulasi atau pelatihan untuk di wilayahnya sendiri.”

**d. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan**

“ada, di dekat pantai itu ada alatnya yang untuk mendeteksi tsunami.”

**2) Terdapat instalasi peralatan untuk peringatan bencana**

“pertama ya itu tadi alat yang ada di pantai, kedua kita pasang seperti toa itu di masjid-masjid di sepanjang pantai, ada juga di Gedung SAR di Parangtritis.”

### **3) Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf**

“kalau di PMI, pada dasarnya sudah menjadi standar untuk jadi anggota PMI, baik itu relawan maupun staf itu memang diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar atau orientasi dasar. Nah orientasi dasar disini mencakup semuanya seperti pengetahuan kebencanaan dan juga berhubungan dengan pertolongan pertama. Itu menjadi dasar dan persyaratan semua anggota disini harus mendapatkan pelatihan itu, meskipun entah nanti selanjutnya spesialisasi masing-masing akan berbeda-beda, karena di PMI sendiri itu 1 orang cuma berhak mendapatkan spesialisasi khusus di kebencanaan itu Cuma 2 jenis. Seperti saya, saya cuma ambil spesialisasi di masalah logistik dan pertolongan pertama. Nah persyaratan ini juga berlaku untuk relawan yang mau bergabung ke PMI karena di PMI ini banyak sekali ada masalah mitigasi, masalah asesmen, masalah dapur umum, pertolongan pertama, perawatan keluarga, jadi memang ada banyak sekali materi yang berhubungan dengan kebencanaan yang ada di PMI ini.”

#### **e. Mobilisasi Sumber Daya**

##### **1) Tersedia mekanisme untuk mengelola sumber daya dari luar (pihak swasta, donator, NGO, relawan)**

“karena kita ini kelembagaan sampai ke pusat, ketika terjadi bencana itu selalu datang NGO. Dan kita akan koordinasikan dengan PMI daerah dan PMI Pusat. Nah untuk mengelola sumber daya dari luar, misalnya NGO ya, jika tingkatnya tingkat nasional mereka akan bekerjasama dengan PMI Pusat, jadi kita cuma bekerja sebagai penerima dan penyalur saja. Tapi kalau NGO yang mendapatkan dari tingkat provinsi, ya PMI Provinsi yang bekerjasama. Kalau tingkat kabupaten, ya kita akan melakukan kerjasama dengan tingkat kabupaten dengan nota kesepahaman yang ada terus pengennya NGO ini alokasi dana

mau untuk apa ya kita menyesuaikan, jadi kita ngikutin NGO aja sih pada prinsipnya. Kemudian kalau relawan dari luar, kita disini ada bidang SDM. Jadi ketika dalam kondisi bencana, semua relawan dari luar harus kita tanyakan masalah keahliannya atau spesialisasinya. Kemudian ketika dia tidak ada legalitasnya dari instansi yang ada ya kita tetep ga berani nerima mbak. Karena risiko kita ga mau nanggung. Karena lembaga di Palang Merah kita kan juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 ya yang disitu juga sudah melapor ke semuanya, jadi memang beratnya ada disitu. Tapi kalau situasi normal seperti ini, lalu ada relawan dari luar memang kita wadahi, kan di PMI relawan dibagi menjadi 4; satu tingkat sekolah yang namanya PMR atau Palang Merah Remaja, trus usia 17-35 tahun kita wadahi dalam KSR atau sukarela, relawan yang ketiga itu kita wadahi dalam TSR atau Tenaga Suka Rela yang usianya sudah diatas 35 tahun dan dia sudah memiliki keahlian, dalam arti keahlian disini sesuai dengan bidang kerja dia. Contoh, misal saya jadi supir, usia saya sudah lebih dari 35 dan saya mau jadi relawan di PMI, masuknya jadi TSR, dan ketika saya masuk PMI, masuk pertama saya cuma dapet orientasi dasar saja. Karena apa, nanti PMI butuh saya yang sesuai dengan bidang kebiasaan saya saja, bukan diambil spesialisasi seperti yang tadi saya jelaskan. Nah di PMI itu boleh melakukan pelatihan Cuma untuk KSRnya saja, tapi kalau TSR khusus untuk keahlian, jadi ketika kita ada perawat, ada dokter itu kita ambil dari TSR yang kita rekrut. Setiap tahun kita mengadakan rekrutmen, misal kita butuh dokter, kita akan sebar informasi ini ke semua dokter yang ada, mau tidak bergabung menjadi relawan PMI jadi TSR. Jadi sewaktu-waktu ada bencana, kita siap mengirimkan dokter tersebut. Relawan yang keempat adalah donor darah sukarela. Kalau ini tidak

terbatas yang jelas bisa usia 17 sampai dengan usia dia masih produktif itu bisa menjadi relawan donor darah sukarela, ini diharapkan dia bisa melakukan donor darah secara rutin setiap 2 bulan sekali, tanpa harus menanyakan untuk 'siapa darah saya?' jadi dengan kesadaran sendirinya dia akan melakukan donor darah, gitu.”

**2) Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando**

“komando ini ada di BPBD nantinya, seperti yang tadi saya bilang bahwa BPBD Bantul memiliki Pusdalops, jadi nanti Pusdalops yang akan memberikan komando ke instansi-instansi lainnya.”

**3) Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah**

“kita koordinasi langsung, lalu ada grup WA juga jadi di dalam grup itu sudah terdiri dari BPBD, ada PMI, ada PLN, ada Kepolisian, dan sebagainya. Memang tidak semua *stakeholder* yang ikut dalam grup. Kalau di PMI hanya kepala markas, lalu perwakilan dari pengurus, sama bidang penanggulangan bencana yang masuk grup itu. Kita pakai HT juga, tapi HT itu kita gunakan hanya dalam penanganan. Karena kalau bencana kadang seringnya da masalah kalau pake HP ya, jadi kita pakai HT.”

**4) Tersedia jaringan kerja di luar pemerintah untuk memobilisasi sektor swasta dan NGO dalam merespon keadaan darurat bencana**

“yang jelas, ketika terjadi bencana relawan atau NGO itu harus terdaftar di posko. Jadi kita harus cek administrasinya juga, lalu mereka maunya seperti apa, ahlinya dalam bidang apa, nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan.”

**5) Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat**

“sudah ada, karena saat masuk sudah dapat orientasi dasar mencakup pengetahuan bencana dan pertolongan pertama dari evakuasi sampai penanganan, lalu ketika masuk spesialisasi mereka akan dapat pelatihan khusus lagi. Misalnya tim asesmen, kita sudah ada relawan yang memang kemarin sudah dilatih khusus asesmen. Terus ketika kita butuh dapur umum, itu juga sudah ada pelatihan khusus tentang dapur umum, alatnya seperti apa, bagaimana, dan sebagainya itu sudah ada. Jadi memang semuanya kita harapkan sesuai dengan spesialisasinya masing-masing.”

**6) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

“kalau gak salah itu ada di BPBD jadi semacam buku saku paling ya.”

**7) Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana**

“ada mbak, itu sesuai sama aturan, sesuai dengan SK. Jadi kita dibawah Sknya pengurus ya mbak dalam arti kita... jadi gini, kita itu setiap rencana strategisnya ikut dengan rencana strategis yang ada di PMI Pusat. Jadi kalau tahun ini, kita semua di PMI Kabupaten dan PMI Provinsi itu harus menjalankan semua visi misi yang ada di pusat, begitupun rencana strategisnya mengikuti pusat. Tahun ini ada 7 rencana strategis yang harus dijalankan. Ketujuh rencana itu berhubungan dengan kebencanaan, berhubungan dengan donor darah juga, berhubungan dengan masalah relawannya, itu semua ada.”

**8) Tersedia rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev**

“itu yang melaksanakan adalah PMI di atasnya. Jadi apa yang kita lakukan di PMI Kabupaten biasanya yang melakukan monev PMI Provinsi, nah apa yang dilakukan PMI Provinsi akan dilakukan monev oleh PMI Pusat. Itu dilakukan setiap setahun sekali. Biasanya di akhir tahun gini akan dilakukan monev. Karena apa? Karena berhubungan dengan barang-barang yang ada di gudang.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“alhamdulillah pemerintah sudah melakukan pelatihan di tingkat masyarakat. Itu sangat berdampak untuk membangun kesiapsiagaan. Terus sarana prasarana di setiap wilayah yang rawan bencana alhamdulillah sudah mulai responsif, ya seperti tadi mulai dari EWS, kemudian petunjuk evakuasinya juga sudah ada. Tapi ya yang paling utama masyarakatnya sih mbak, semuanya sudah tanggap, kesadaran masyarakat sudah tinggi. Selain itu, relawan di Bantul itu paling banyak loh mbak relawannya. Karena kesadaran masyarakatnya tinggi. Sebenarnya tertolong juga sih. Ini efek dari yang dijalankan pemerintah ketika kita gencar-gencarnya melakukan pelatihan-pelatihan ke masyarakat, akhirnya masyarakat jadi sadar.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“kalau penghambatnya itu, kesadaran masyarakat di tingkat desa. Jadi, wilayah desa itu belum tanggap masalah kebencanaan. Jadi ketika teman-teman FPRB, teman-teman

relawan di tingkat desa itu ingin meningkatkan kesiapsiagaan, meningkatkan masalah pengetahuan di tingkat masyarakat ini belum bisa bagus. Karena masih menganggap sebelah mata masalah kebencanaan. Lebih banyak alokasi ke struktural. Jadi sebenarnya walaupun FPRB itu dibentuk sama BPBD, tapi antara FPRB dan BPBD itu tidak ada struktur yang jelas. Nah FPRB ini butuh sumbangsih dari pemerintah desa sebenarnya. Nah yang jadi masalah, belum semua desa itu paham tentang kesiapsiagaan bencana. Tapi kalau di tingkat kabupaten sendiri itu sudah sangat mendukung kegiatan kebencanaan selama ini.

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“nah ini yang menjadi repot sebenarnya selama ini yang dilakukan BPBD dengan kita adalah koordinasi di tingkat desa, meskipun belum semuanya ya mbak. Karena di Bantul sendiri itu ada 75 desa. Kita berkaca dengan covid kemarin saja, wilayah desa yang mampu itu baru 80% dari 75 desa tentang penanganan kebencanaan, yah entah dari faktor sumber daya manusianya, entah dari faktor masalah kelembagaan pemerintah desanya yang masih sangat kurang. Yaa kita hanya mencoba untuk koordinasi saja mbak, karena kita juga tidak bisa menekankan untuk anggaran desa harus berapa persen untuk kebencanaan itu tidak bisa. Karena mereka pakai anggaran pendapatan desa sendiri kan, jadi memang kewenangan desa masing-masing. Jadi kami hanya bisa menyarankan dan mengkoordinasikan saja.”

**7. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana, Wakil Koordinator Tagana (16 November 2021), Pengurus Logistik (19 November 2021) Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

**a. Pengetahuan**

**1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

**Wakil Koordinator Tagana:** “di Kabupaten Bantul itu yang letaknya dekat dengan pesisir memang ada tiga kecamatan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan. Jadi kalau terjadi tsunami, maka 3 kecamatan itu akan mengalami dampaknya. Dalam hal ini untuk kesiapsiagaan sudah dikomandoi oleh Pusdalops BPBD Bantul.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

**Wakil Koordinator Tagana:** “dari gempa mbak, lalu surut, lalu muncul gelombang tinggi.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

**Wakil Koordinator Tagana:** “untuk daerah pesisir Bantul, selama ini memang sering diadakan kegiatan ataupun simulasi berkaitan dengan bencana termasuk tsunami. Selama ini sudah diadakan dari BPBD Bantul. Kalau untuk kerentanan warga selama ini sudah mengetahui hal-hal apa yang harus mereka lakukan seandainya terjadi bencana yang tidak kita inginkan.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

**Wakil Koordinator Tagana:** “kemarin saat bulan oktober memang sudah diadakan simulasi keposkoan untuk bencana tsunami di Kabupaten Bantul. Ini kemarin sudah ada jalur-jalur evakuasi yang disediakan oleh BPBD Bantul. Hampir setiap tahun ada untuk simulasi kesiapsiagaan ini diadakan. Kami di

Tagana sebagai yang membantu di Dinas Sosial, dalam hal ini untuk di bagian logistik dan dapur umum.”

**b. Kebijakan**

**1) Tersedianya kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola bencana**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“ada, panduannya yang memberikan dari BPBD.”

**2) Terdapat rencana aksi untuk tanggap darurat**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“rencana aksi ini juga ada di BPBD, disana ada protapnya, ada SOPnya, ada rencana aksinya juga.”

**3) Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“baik di BPBD maupun di Dinas Sosial itu ada, jadi misalnya kejadian tsunami itu kita ada istilahnya dana tak terduga. Karena kita tidak bisa mengalokasikan dana sekian untuk bencana ini, ga mungkin. Karena kita ga tau ya. Tetapi masuk di anggaran dana tak terduga. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan itu sudah ada dananya, misal nanti untuk makan, untuk pengungsian, untuk air bersih, dan lain-lain. Jadi nanti biasanya kita ajukan kebutuhannya apa, untuk bencana itu apa, dibutuhkan berapa, baru diajukan, nanti di accnya berapa, artinya kita tidak tau berapa dana yang bisa dialokasikan tiap tahunnya karena kadang berbeda-beda nominalnya.”

**4) Terdapat peraturan terkait organisasi pengelola bencana dan prosedur tetap pelaksanaan**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“peraturan organisasi ini memang ada, di Tagana juga ada peraturannya. Isinya itu tentang bentuknya seperti apa, organisasinya seperti apa, nanti mbak mia bisa cek di Tagana

Kabupaten Bantul disitu ada protap, keanggotaan, susunan pengurusnya, dan sebagainya.”

**5) Terdapat peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“ini ada peraturannya. Biasanya jika sudah ada kejadian akan langsung diadakan koordinasi lintas sektor yang mana untuk menentukan tempatnya dimana, gedungnya dimana, yang paling dekat, dan lengkap fasilitasnya.”

**6) Terdapat peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat) dan protap pelaksanaan**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“ada memang, kita punya Kampung Siaga Bencana. Ada di *website* KSB Kabupaten Bantul, disitu ada referensi-referensi terkait KSB. Misal terjadi tsunami, nanti akan terlihat yang paling dekat itu KSB yang ada di mana yang nanti akan mendukung bahan logistiknya. Kan tidak semua kecamatan atau kapanewon ada KSB. Di Kabupaten Bantul yang punya 17 kapanewon itu cuma punya 6. Tapi dari 6 KSB itu bisa mewakili untuk daerah-daerah rawan. Nah nanti kalau kejadiannya di Kapanewon Kretek, itu dekat dengan KSB yang dimana, nah nanti bisa mendukung disitu.”

**c. Rencana Tanggap Darurat**

**1) Tersedianya divisi pengelola bencana**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“kalau di Dinsos, kita ada Tagana. Bisa dicek di *website* tagana ya mbak. Tagana ini ada Tagana Kabupaten Bantul, Tagana DIY juga ada, nah nanti akan ada koordinasi yang kaitannya dengan *support* logistik. Misal provinsi mau mendukung atau

membantu kebencanaan di Bantul nanti lewat koordinasi dengan Tagana,”

**2) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“ini kita ada, sudah dijelaskan juga tugas-tugas dari setiap pengurus, mbak mia bisa cek di *website* Tagana ya mbak.”

**Wakil Koordinator Tagana:** “ada, jadi kalau tupoksi kami itu ada di divisi shelter, divisi dapur umum dan logistik, dan psiko sosial. itu yang kami kerjakan.”

**3) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“untuk rencana sosialisasi ini sudah diagendakan seperti sosialisasi di KSB dan di sosialisasi kebencanaan. Karena ditempat-tempat rawan itu pasti diadakan sosialisasi baik dari BPBD Kabupaten atau BPBD Provinsi tuh biasanya ngadain sosialisasi.”

**4) Tersedia nomor hotline informasi bencana**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“di Kabupaten Bantul itu saat ini sudah berjalan ya yang namanya *call center* untuk tanggap darurat. Jadi tanggap darurat disini tidak hanya soal kebencanaan, tapi darurat misalnya orang mengamuk, ada kebakaran, ada gempa, ada tsunami, itu dibentuk *call center* 112. Nah ini masing-masing OPD sudah tergabung disitu. Nanti ada komandonya.”

**5) Tersedia data alokasi bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“ini ada di logistik kami, ada pelaporannya juga.”

**Pengurus Logistik Dinsos:** “ada datanya, jadi data ini kita pisah berdasarkan sumbernya ya. Ada yang dari APBD dan ada dari yang APBN.

**6) Terdapat daftar tempat penyimpanan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:** “kami ada gudang logistik sendiri. Nanti bisa mbak mia cek langsung ke logistik dinsos.”

**Wakil Koordinator Tagana:** “untuk logistik kami ini ada petugas piketnya, kami juga sudah *on call* 24 jam, jadi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, tim logistik sudah siap.”

**Pengurus Logistik Dinsos:** “untuk data barang-barang yang kita simpan ini memang cuma di gudang ini saja. Nah data ini kita perbaharui setiap bulannya berapa jumlah barang masuk dan berapa jumlah barang keluar. Ini setiap akhir bulan.”

**7) Tersedia prosedur pengadaan bahan dan perlengkapan kebutuhan dasar dalam keadaan darurat**

**Pengurus Logistik Dinsos:** “jadi kebutuhan-kebutuhan ini dari Kementerian Sosial. Memang ditaruh disini, supaya jika terjadi keadaan darurat ini bisa langsung digunakan tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar. Nah ini untuk bahan bahan makanan ada kadaluwarsanya, biasanya 3 bulan sebelum kadaluwarsa ini sudah harus dikeluarkan dan disalurkan ke pihak yang membutuhkan, bisa untuk panti asuhan, atau kegiatan sosial lainnya. Nah perintah itu datangnya memang dari Kementerian Sosial. Karena sayang juga toh mbak kalau tidak bisa dimakan atau digunakan karena sudah kadaluwarsa.”

**8) Tersedia prosedur untuk distribusi bahan dan perlengkapan dalam keadaan darurat**

**Pengurus Logistik Dinsos:** “jadi gini mbak, ini saya kasih contoh yang kemarin saja ya. Jadi kita buat data, isinya itu ada

data kejadian, kalau kemarin itu tanah longsor. Kemudian daftar penerimanya siapa-siapa saja, alamatnya masuk desa mana, kemudian tanggalnya berapa, jam berapa, lalu jenis kerusakannya seperti apa misal rumah tertimpa longsor, kronologi seperti apa, dan disertakan foto dokumentasi juga. Alurnya tuh gini kita dapat laporan misal tempat A membutuhkan bantuan atau telah terjadi bencana, dari rekan-rekan kita yang ada di lokasi, mereka akan membuat asesmen dengan data-data yang saya sebutkan tadi. Kemudian dari asesmen, dikirimkan ke posko, dicek apakah memang layak atau tidak. Jika layak maka akan kita kirimkan. Jadi pemetaannya memang kita di posko. Dari hasil asesmen itu mbak kita petakan membutuhkan kiriman logistik atau tidak, kalau iya baru kita bisa bergerak. Nah ini sebagai dasar kita untuk pengiriman logistik ini. Kalau kebutuhannya, dari tim asesmen kan sudah laporan, terus kita yang di posko cermati lagi, kita laporkan ke Pembina, jika di setujui baru kita dorong. Untuk jumlah logistik yang kita kirim itu jumlahnya sesuai dengan hasil asesmen, misal yang membutuhkan satu keluarga terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 bayi. Maka kita akan kirimkan logistik yang cukup untuk 2 orang dewasa dan 1 bayi, termasuk *kids ware* itu kita berikan.”

**9) Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**  
“ada, kami ada kecuali MCK ya.”

**Wakil Koordinator Tagana:** “kalau untuk MCK kami tidak ada, jadi tugas kami di Tagana dan Dinas Sosial ini untuk dapur umum dan logistik, jadi kami memang tidak menyediakan MCK. Kalau lain-lainnya mungkin dari dinas yang lain.”

**10) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“yang memberikan pelatihan ini bukan hanya Dinsos atau Tagana, tapi ada juga dari OPD lain misalnya seperti BPBD, atau dari pihak ketiga atau LSM juga kadang ada pelatihan.”

**Wakil Koordinator Tagana:** “untuk kemarin melibatkan FPRB setempat. Kami yang dari Dinsos itu mengikuti gladi dari posko Tagana. Jadi menggunakan HT saja kemarin. Untuk kegiatan yang diadakan oleh Tagana, dalam hal ini sosialisasi untuk tingkat sekolah, sudah melaksanakan sejak tahun 2010. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan permintaan dari sekolah-sekolah baik itu di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Nah kalau sosialisasi masyarakat ini juga berdasarkan permohonan dari pihak kelurahan ataupun FPRB.”

**d. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“untuk pengadaan sistem ini dari BPBD biasanya ya.”

**2) Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“nah disini juga yang mengadakan pelatihan itu dari BPBD, BNPB, kementerian terkait psiko sosial juga ada pelatihannya. Sehingga pelatihan ini didapatkan dari beberapa instansi.”

**e. Mobilisasi Sumber Daya**

- 1) Terdapat kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“ini terangkum dalam satu kabupaten, misal Kabupaten Bantul, kita sudah ada kesepakatan antara berbagai instansi, siapa berbuat apa itu sudah ada kesepakatannya, dan ini semua sudah terkoordinir.”

- 2) Tersedia mekanisme untuk mengelola sumber daya dari luar (pihak swasta, donator, NGO, relawan)**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“pengelolaan ini nanti dari BPBD ya, biasanya sih dari BPBD DIY. Kemudian dari BPBD DIY akan berkoordinasi dengan yang ada di kabupaten, kemudian kabupaten nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk kebencanaannya, kemudian dengan pihak setempat juga.”

- 3) Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“di Kabupaten Bantul ada *call center* 112, disitu terdiri dari semua OPD dan pihak ketiga yang menangani kebencanaan. Misalnya PMI, Polsek, Satpol PP itu ada. Nah tergantung dari bencananya apa nanti disitu ada komandonya.”

- 4) Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**

“kami ada *linknya* di Tagana untuk asesmen, jadi untuk mendata korbannya ada berapa dan kebutuhannya berapa itu akan diketahui. Misal butuhnya adalah psiko sosial, kemudian

akan diterjunkan psikolog ke sana. Ini juga terkoordinasi juga dengan tim relawan, FPRB, dan sebagainya.”

- 5) Tersedia protokol untuk komunikasi publik yang berkaitan dengan informasi keadaan darurat (secara regular dan bertanggung jawab)**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**  
 “ini juga ada komando yang berjenjang untuk memberikan komunikasi ke publik. Kalau dari Dinsos dimulai dari ketua Tagananya, sekretaris, tim yang ada di lapangan.”

- 6) Tersedia jaringan kerja di luar pemerintah untuk memobilisasi sektor swasta dan NGO dalam merespon keadaan darurat bencana**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**  
 “jadi disini kita ada Bappeda yang akan mengumpulkan para investor, NGO, CSR, yang kalau dalam keadaan darurat akan difokuskan untuk penanganan darurat.”

- 7) Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**  
 “ini ada, karena Tagana memang disiapkan untuk penanggulangan bencana. Disamping Tagana, di BPBD juga ada FPRB. Masing-masing OPD memiliki tanggung jawab masing-masing.”

- 8) Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:**  
 “tergantung koordinasinya, ada koordinasi dengan BPBD Bantul, BPBD DIY, ada juga dari BNPB, bisa juga dari Tagana yang nantinya akan membimbing atau membimtek para Taruna Siaga Bencana atau kalau di masyarakat misalnya KSB itu

dibimtek oleh tim pelatih bisa dari BPBD Bantul atau BPBD DIY.”

**Wakil Koordinator Tagana:** “kami yang dari Tagana, mengadakan ada dua sistem, yaitu sosialisasi ke masyarakat lewat komunitas, lewat desa, lewat dukuh, atau RT. Kemudian ada juga sosialisasi berbasis sekolah, jadi Tagana Masuk Sekolah nama programnya. Ini kita kenalkan bencana ke anak-anak sedini mungkin, mulai dari jenis bencananya, cara penyelamatannya yang berbeda-beda, seperti itu. Itu juga dari berbagai bencana mulai dari gempa, tsunami, puting beliung, dan sebagainya. Ini yang kami jalankan program dari Tagana.”

**9) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

**Wakil Koordinator Tagana:** “mungkin itu ada di BPBD ya, karena kami dalam hal ini untuk materi memang belum mudah diakses.”

**10) Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:** “sudah dilaksanakan.”

**11) Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:** “tadi sudah kita bahas di depan ya, prosedurnya seperti apa.”

**12) Tersedia rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev**

**Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana:** “memang ini ada, dari DIY biasanya dilakukan monev setiap tahun.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat**

- a. Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Wakil Koordinator Tagana:** “mungkin dalam sistem koordinasi, koordinasi untuk di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selama ini di Kabupaten Bantul sudah berjalan bagus.”

- b. Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Wakil Koordinator Tagana:** “selama ini mungkin belum ada hambatan ya, karena dari masyarakat juga sebenarnya membutuhkan sosialisasi bencana ya. Karena mereka sudah sadar tentang bencana.”

**8. Kawat Sosial dan Panewu Anom Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul (15 November 2021)**

**a. Pengetahuan**

- 1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

**Kawat Sosial:** “dampak tsunami yang bisa timbul itu nantinya karena di Kabupaten Bantul ini pantainya merupakan objek wisata, dalam hal ini termasuk Pantai Parangtritis, otomatis perekonomian yang ada di Parangtritis tentunya akan jatuh karena adanya tsunami itu.”

**Panewu Anom:** “disisi keselamatan warga, karena kita punya Pantai Parangtritis sampai Pantai Depok itu, kalau terjadi tsunami disaat objek wisata ramai pasti banyak sekali korban. Tidak disaat ramaipun, pengunjung ini banyak baik itu wisatawan maupun pedagang ada banyak di sekitar pantai. Jadi dampaknya pasti akan luar biasa. Walaupun sebenarnya beberapa pelatihan sudah dilaksanakan oleh BPBD

Kabupaten, bahkan dulu pernah ada simulasi namanya *tsunami drill*. Pelatihan-pelatihan gitu memang sering dilaksanakan, karena manusia kebanyakan sering lupa kalau sedang ada di sekitar pantai. Jadi kalau... apa namanya... tsunami itu kerap pelatihan, kerap pembinaan, saya kira bisa mengurangi risiko tsunami ke masyarakatnya. Jika lupa, diingatkan, lupa, diingatkan. Tidak hanya sekali dua kali. Walaupun pesertanya tidak sebanyak di Poncosari, Srandakan.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

**Panewu Anom:** “kalau tipe tsunami apa ya? Saya malah belum paham tipe-tipe, tapi kalau penyebab kan karena ada gempa di laut, kemudian menimbulkan ombak naik yang sangat besar gitu.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

**Kawat Sosial:** “ya kalau tsunami itu betul-betul terjadi ya cukup rentan. Karena bagaimanapun juga kondisi tempat tinggal warga itu berdekatan dengan pantai. Makanya, upaya kita ya itu tadi seperti yang dijelaskan tadi, kita harus terus mengingatkan masyarakat karena mereka pasti sering lupa. Jadi walau mereka tinggal di dekat pantai, paling tidak mereka tau harus berbuat apa untuk menyelamatkan diri mereka.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

**Kawat Sosial:** “kalau di wilayah kapanewon sini belum ada mbak fasilitas kritis, adanya di Bantul. Disana ada rumah sakit-rumah sakit yang sudah siap.”

**b. Kebijakan**

**1) Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana**

**Kawat Sosial:** “kalau kita itu hanya memfasilitasi, yang banyak ada di kelurahan-kelurahan karena untuk digunakan kegiatan

FPRB. Kami memfasilitasi dalam bentuk menyediakan tempat, misal ada kegiatan dari BPBD Bantul, nah kita siapkan tempatnya disini untuk tempat berkumpul FPRB-FPRB dan BPBD.”

### c. Rencana Tanggap Darurat

#### 1) Tersedianya divisi pengelola bencana

**Kawat Sosial:** “ada, ada Kawat Keamanan dan Kawat Sosial yang berkaitan dengan kebencanaan.”

#### 2) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan

**Kawat Sosial:** “yang tadi saya bilang mbak, kalau di Kapanewon sendiri kami ada Kawat Keamanan dan Kawat Sosial yang biasa menangani kebencanaan. Misal sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan warga itu akan menjadi tugas dari Kawat Keamanan, lalu untuk kebutuhan atau kegiatan itu dengan saya.”

#### 3) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian

**Kawat Sosial:** “ada, sudah ada rambu-rambunya juga kemana arah tempat evakuasi, dan dimana titik tempat evakuasinya itu ada.”

#### 4) Tersedia peta bahaya tsunami dan peta evakuasi

**Kawat Sosial:** “kalau di kantor kapanewon sendiri sih belum ada mbak. Tapi BPBD pasti ada. Pas simulasi itu peta bahaya hanya disampaikan secara ditunjukkan saja gitu.”

#### 5) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi

**Kawat Sosial:** “ada, di pinggir jalan juga sudah terlihat.”

- 6) **Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

**Kawat Sosial:** “ini memang sudah disosialisasikan ke masyarakat, kalau wisatawan ya mereka pasti dengan sendirinya sudah melihat ada rambu-rambunya.”

- 7) **Tersedia data alokasi bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar**

**Kawat Sosial:** “tidak ada, biasanya kalau untuk bantuan itu datangnya dari BPBD, Bantul, atau dari tingkat provinsi aja.”

- 8) **Tersedia prosedur untuk distribusi bahan dan perlengkapan dalam keadaan darurat**

**Kawat Sosial:** “kalau ini paling koordinasi dengan Bantul ya.”

- 9) **Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)**

**Kawat Sosial:** “ini biasanya dari Bantul juga, kalau dari Kecamatan kita tidak punya ini. Biasanya yang nyediain itu kayak Dinsos, TNI, pokoknya dari pemerintah kabupatennya.”

- 10) **Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

**Panewu Anom:** “ada ini, sering dilakukan juga biasanya sama BPBD. Sekitar 1 tahun sekali sepertinya dilaksanakan. Pesertanya itu banyak, tapi memang tidak sebanyak di Poncosari.”

**Kawat Sosial:** “kalau wisatawan belum ya, paling hanya warga yang ikut, tapi cuma perwakilan aja. Kayak warga-warga yang tahun 2006 kemarin sempat kena tsunami itu diajak untuk ikut pelatihan beberapa. Kalau ketua RT juga yang ikut hanya perwakilan saja.”

**d. Sistem Peringatan Bencana****1) Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal**

**Kawat Sosial:** “karena disini tidak pernah mengalami tsunami yang hebat, jadi tidak ada hal-hal seperti itu sih mbak. Kita pakai alat yang disediakan BPBD saja itu seperti sirine.”

**2) Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan**

**Kawat Sosial:** “iya itu BPBD pasang alat di masjid-masjid dekat pantai, jadi bunyinya semacam sirine gitu mbak. Nah itu yang memberikan peringatan ke warga kalau terjadi tsunami, yang menyalakan itu juga sepertinya dari BPBD ya.”

**3) Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan**

**Kawat Sosial:** “ada, pakai sirine aja mbak.”

**4) Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf**

**Kawat Sosial:** “ada, biasanya dari BPBD Bantul atau BPBD Provinsi. Mereka yang suka mengadakan pelatihan-pelatihan kebencanaan/”

**e. Mobilisasi Sumber Daya****1) Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando**

**Kawat Sosial:** “kalau terjadi bencana itu komando ada di BPBD. Jadi kita tinggal mengikuti arahan BPBD saja.”

**2) Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah**

**Kawat Sosial:** “ada, kita ada grup WA. Nah kalau terjadi bencana itu ada HT, tapi HT hanya diberikan di tiap-tiap kelurahan saja.”

**3) Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat**

**Kawat Sosial:** “kalau di kapanewon sini sih karena tugas pokoknya bukan kebencanaan, jadi belum begitu terlatih ya untuk bencana-bencana seperti itu. Kalau secara garis besarnya kita tau, tapi kalau bicara soal tugas pokok itukan lebih ke BPBD, jadi pasti BPBD yang punya personil terlatih.”

**4) Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat**

**Kawat Sosial:** “ada, ini dari BPBD dan FPRB.”

**5) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

**Kawat Sosial:** “kalau dari BPBD ada ya, brosur-brosur gitu mbak. Kalau wisatawan kan hubungannya dengan Dinas Pariwisata Bantul, jadi harusnya Dinpar juga punya.”

**6) Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana**

**Kawat Sosial:** “kalau secara khusus kita belum ada mbak.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Panewu Anom:** “yang mendukung ya... itu tadi, sering dilakukan simulasi, kemudian tentu ada dukungan dana untuk kegiatan kesiapsiagaan, selain itu juga ada pertemuan-pertemuan rutin yang menyisipkan info-info tsunami bahwa kita hidup di pinggir pantai, yang setiap saat bisa terjadi tsunami, dan tsunami itu bisa memakan korban banyak karena ketidaksiapan kita sebagai penghuni pinggir pantai itu menjadi pengingat juga.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Panewu Anom:** “kesadaran kita, karena di pinggir pantai itu kita punya objek wisata yang menjadikan rupiah, dan menjadikan kita dapat uang itu disitu. Jadi apapun risikonya tetap masyarakat kita tetap berusaha di pinggir pantai itu. Terus banyak rumah makan, warung makan, dan sebagainya di pinggir pantai, yang mestinya... nuwun sewu ini kalau kemudian... apa ya... ya kita sebenarnya ada kelemahannya. Karena apa? Ya dibiarkan bangun disitu. Kan harusnya membangun ada berapa jaraknya dari bibir pantai, itu di IMB ada sebenarnya. Tapi ya itu kita susah untuk bertindak tegas. Karena tau-tau sudah berdiri, tidak minta IMB karena kalau minta tidak akan diizinkan. Kalau di Pantai Parangtritisnya sendiri kan lumayan datar ya mbak, ada gumuk pasir tapi agak kesanaan. Jadi kalau terjadi tsunami itu rumah, pedagang, rumah makan, warung makan bisa habis kena tsunami.”

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Panewu Anom:** “yaa kalau ada pembinaan, ada pertemuan, ini kita sisipkan. Tidak semudah itu mbak bicara dengan masyarakat yang membangun itu. Karena pantai ini menjanjikan untuk menghasilkan uang tadi. Jadi pelan-pelan kita beritahukan.”

**9. Lurah Parangtritis (19 November 2021) dan Kamituwo (11 November 2021) Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul**

**a. Pengetahuan**

**1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

**Lurah:** “kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi bencana, baik itu tsunami, tanah longsor, angin ribut itu kita sudah ada tim namanya FPRB, itu terdiri dari 90 lebih anggotanya. Tim ini gunanya untuk membangun kesiapsiagaan desa. Selama saya menjabat ini memang tidak pernah ada tsunami yang besar ya, tapi kalau terjadi bencana itu pasti keselamatan warga akan terancam karena di Pantai Parangtritis itu sangat ramai ya baik dari warga yang tinggal di sekitar pantai, pedagang, wisatawan itu berkumpul terus di area pantai.”

**Kamituwo:** “umpama terjadi tsunami, pohon itukan bisa tenggelam, hampir separuh masyarakat desa ini harus mengungsi.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

**Lurah:** “kalau penyebabnya itukan dari alam, tandanya itu dari gempa lalu nanti ada gelombang besar.”

**Kamituwo:** “karena ada gempa besar, lalu muncul tsunami.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

**Lurah:** “masyarakat kita sudah sering diberikan pelatihan untuk bencana, yang mengadakan itu ya tim FPRB. Jadi warga kami sudah paham kalau ada bencana harus bagaimana dan kemana.”

**Kamituwo:** “masyarakat sudah tau tentang tsunami, tanda-tandanya dan cara evakuasi itu sudah tau. Tapi masih ada aja masyarakat yang kurang sadar untuk mengurangi bahaya tsunami. Sekarang sudah ada FPRB, fungsinya kalau ada

tsunami mereka bisa mengomandoi masyarakat. Tapi pasti ada aja yang ngeyel.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

**Lurah:** “kalau kayak shelter gitu belum ada di kelurahan, tapi kami sudah Kerjasama dengan puskesmas itu sudah sejak lama. Jadi kalau terjadi apa-apa itu puskesmas sudah siap untuk bantu terkait masalah kesehatan.”

**Kamituwo:** “kalau dari pemerintah tidak ada, tapi ada 2 klinik dan bidan yang siap bantu. Sama puskesmas gitu.”

**b. Kebijakan**

**1) Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana**

**Lurah:** “ada. ini juga ada aturannya untuk penanganan bencana itu minimal 8% dari dana yang diberikan oleh pusat. Kemudian kita ada dana desa, itu juga ada yang disisihkan untuk bencana.”

**c. Rencana Tanggap Darurat**

**1) Tersedianya divisi pengelola bencana**

“kami ada FPRB mbak, itu kami dukung semua pendanaannya dari dana desa.”

**2) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

**Lurah:** “ada, kami ada pengurus inti, lalu seksi-seksi, lalu kalau ada bencana pembagian tugasnya nanti juga ada dari BPBD dan dinas-dinas. Semua harus bekerjasama.”

**3) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian**

**Lurah:** “kalau di Pantai Parangtritis itu ada yang ke Bulak Mabul ya paling dekat, kalau geser lagi keatas itu ada Maulana Maghribi, kemudian di kantor kelurahan juga itu dijadikan tempat evakuasi.”

**4) Tersedia peta bahaya tsunami dan peta evakuasi**

**Lurah:** “ada, kami di kantor ada petanya. Nanti bisa dilihat sendiri peta tsunami, lalu ada peta evakuasi juga. Petanya ada di markas tim FPRB, karena markas FPRB Parangtritis itu ada di Kantor Kelurahan Parangtritis.”

**5) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

**Lurah:** “ada, tahun 2018 lalu itu dibuat seperti papan nama tempat evakuasi.”

**6) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

**Lurah:** “sebenarnya tidak perlu disosialisasikan kalau tempat evakuasi ya, karena mereka tinggal disana, jadi sewaktu papan itu dipasang, mereka jadi tahu kalau tempat-tempat itu dijadikan tempat evakuasi. Tapi kalau sedang ada pelatihan biasanya disosialisasikan lagi ke mereka. Nah sosialisasi ini biasanya perwakilan dari satu KK itu yang ikut satu orang saja, lalu mereka yang bertugas menyampaikan ke anggota keluarganya sendiri. Jadi berjenjang gitu mbak.”

**7) Terdapat daftar tempat penyimpanan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar**

**Lurah:** “kalau untuk penyimpanan, biasanya dibantu oleh BPBD, misal kami dapat bahan-bahan untuk kebutuhan itu ya. Itu disimpan di balai kelurahan.”

**8) Tersedia prosedur untuk distribusi bahan dan perlengkapan dalam keadaan darurat**

**Lurah:** “kalau distribusi kami sedang berencana untuk beli mobil *pick up* untuk keperluan distribusi, supaya lebih gampang aja mbak.”

**9) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

**Lurah:** “ada, diadakan oleh BPBD biasanya. Kalau dari kami yang ikut itu FPRB. Mereka mengikuti sesuai dengan tahapan pelatihan yang diadakan.”

**d. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal**

**Lurah:** “alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada tsunami besar. Jadi tidak ada memang peringatan bencana yang secara tradisional itu, karena bencananya tidak ada.”

**2) Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan**

**Lurah:** “di pinggir pantai itu mbak, di masjid-masjid ada sirinanya, kalau terjadi bencana nanti sirine itu bunyi.”

**3) Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan**

**Lurah:** “dari sirine itu warga akan langsung tahu kalau ada bencana, mereka juga sudah tahu dimana tempat evakuasinya. Selain itu, nanti dibantu juga oleh tim FPRB dan ada tim SAR juga di dekat pantai.”

**Kamituwo:** “dari rekan-rekan FPRB, lalu ke tokoh masyarakat. Selain itu masyarakat sudah ada ilmunya, mesti ngerti.”

**4) Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf**

**Lurah:** “untuk seluruh pengurus di kelurahan sudah dapat pelatihan, karena suka diadakan dari BPBD atau dari FPRB juga.”

**e. Mobilisasi Sumber Daya**

- 1) Terdapat kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan**

**Lurah:** “ada, untuk prosedurnya ini juga berjenjang mulai dari yang di lapangan hingga ke pihak yang bersangkutan seperti BPBD atau dinas-dinas lain.”

- 2) Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana**

**Lurah:** “ada. masyarakat sudah percaya dengan pemerintah daerahnya, ada tim FPRB juga yang biasa berinteraksi langsung dengan masyarakat.”

**Kamituwo:** “ada kesepakatan seperti kesepakatan jalur evakuasi, kemudian kesepakatan untuk menyiapkan tempat evakuasi gitu.”

- 3) Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando**

**Lurah:** “komando ini biasanya BPBD ya kalau bencana.”

- 4) Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah**

**Lurah:** “ada. kami ada HT ya, jadi komunikasinya kalau terjadi bencana itu pakai HT. tim FPRB juga punya.”

**Kamituwo:** “ada, untuk komunikasinya kita pakai HT disini ada 2-3 HT yang biasa digunakan.”

- 5) Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat**

**Lurah:** “ada, di kita ada FPRB yang sudah terlatih.”

- 6) Telah teridentifikasi jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pada saat darurat bencana**

**Lurah:** “kalau saya sih belum tau mbak. Selama ini tidak ada yang seperti itu. Paling kalau ada bencana bantuan itu langsung datang.”

- 7) Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat**

**Lurah:** “ada. jadi gini mbak, pelatihan ini beberapa kali kita, Kelurahan itu mengundang BPBD Kabupaten untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat.”

- 8) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

**Lurah:** “ini ada di BPBD, jadi memang kalau yang mengadakan BPBD kita akan dapat materi itu, tapi kalau ke wisatawan itu tidak ada. karena wisatawan itu datang sebentar, lalu pulang. Tidak menetap lama di sana.”

- 9) Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan**

**Lurah:** “kalau ke masyarakat sudah, kalau wisatawan belum.”

- 10) Tersedia informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi**

**Lurah:** “adanya di BPBD kalau ini.”

- 11) Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana**

**Lurah:** “ada. memang kalau untuk kebencanaan ini dipegang oleh FPRB. FPRB Paris Tangguh sendiri sudah ada selama 4 tahun. Jadi yang memobilisasi dana untuk bencana biasanya FPRB.”

**12) Tersedia rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev**

**Lurah:** “ada. setiap tahun dilakukan monev, selalu didokumentasikan juga, pelaksanaannya sudah baik.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Lurah:** “SDM mbak, masyarakat kita itu sudah sadar kalau pengetahuan tentang bencana ini penting apalagi tsunami. Karena kita tinggal di wilayah yang dekat dengan laut ya mbak.”

**Kamituwo:** “anggaran dana dari kelurahan, kesiapan SDM dari FPRB, adanya dukungan dari BPBD, PMI, ada pelatihan ke masyarakat juga terkait kebencanaan.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Lurah:** “karena belum pernah terjadi, jadi kita, masyarakat itu belum ada pengalamannya. Hanya pelatihan-pelatihan saja. Kejadian aslinya seperti apa itu kita belum ada pengalaman. Tapi saya berharap jangan sampai ada tsunami besar di wilayah kami.”

**Kamituwo:** “kesadaran masyarakat untuk mau tertarik dalam menguasai ilmu bencana, lokasi tempat evakuasi ini juga belum maksimal karena hanya tempat saja belum ada bangunannya, kemudian rambu-rambu ini juga belum maksimal karena tidak terlalu banyak rambunya.”

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

**Lurah:** “itu saja mbak, adakan pelatihan untuk masyarakat, lalu simulasi juga, dibentuk FPRB itu juga salah satu upaya ya mbak.”

**Kamituwo:** “koordinasi antara lurah dan RT untuk mengirimkan relawan dari setiap RT.”

## 10. Ketua FPRB Paris Tangguh, Kabupaten Bantul (22 November 2021)

### a. Pengetahuan

#### 1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan

“kalau dampak, Pantai Parangtritis ini akan menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak lebih parah ya. Karena sangat dekat dengan laut, yang pasti bangunan akan rusak, ada kemungkinan korban luka sampai meninggal juga.”

#### 2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana

“kalau yang saya ketahui itu ada penyebab dari gempa, dipicu dengan pergerakan lempeng yang ada di samudera.”

#### 3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami

“kalau kerentanan masyarakat, kami sudah mengedukasi masyarakat bahwa kewaspadaan itu sangat perlu. Kemudian dari anggota kami juga kami ambil dari RT. Jadi 55 RT yang ada di Kelurahan Parangtritis ini saya libatkan semua. Harapan dan tujuan saya ini supaya informasi itu lebih cepat, lebih *update*, dan sudah tersosialisasi dengan masyarakat. 3 hari sebelum ini kami mengundang pembicara juga dari BMKG berkaitan dengan cuaca ekstrim, peserta juga dari 55 RT.”

#### 4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis

“FPRB bekerjasama dengan Kapolsek, Koramil, dan Puskesmas. Seandainya terjadi sesuatu, kami di TEA sudah tersedia tenda-tenda darurat dan sudah disekat-sekat, yang ini

untuk kesehatan, terus ibu hamil, kemudian buat yang sudah tua atau rentan atau disabilitas.”

## 1. Kebijakan

### 1) Terdapat rencana aksi untuk tanggap darurat

“kalau dari FPRB, kami sudah punya buku untuk rencana aksi ya. Jadi siapa berbuat apa itu sudah dibuat. Karena memang rencana akan dibuat rencana kontinjensi, tapi karena ada covid ini jadi diundur. Sebenarnya renkon sudah ada ya, tapi harus diperbarui. Tadinya renkon kami cuma ada 5 itu tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Nah ini ditambah jadi 9 salah satunya itu untuk tsunami. Tapi belum dibuat.”

### 2) Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana

“kalau untuk FPRB sendiri alhamdulillah sampai saat ini, kami FPRB didukung sepenuhnya atau dianggarkan oleh Kelurahan Parangtritis, anggaran dari DD atau dana desa. Setiap tahun itu kita diberikan. Untuk nominalnya sih setiap tahun tidak sama ya, yang kemarin sehubungan dengan kondisi covid, kami malah dapat 2x lipat dana. Jadi kami dari FPRB memang dipercaya sebagai garda depan baik itu pemakaman, penyemprotan, itu kami semua.”

### 3) Terdapat peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi

“kalau untuk pemeliharaan tidak ada, karena bangunan yang digunakan itu bangunan yang sudah ada sejak awal ya. Seperti di balai desa ini bangunannya ya bangunan balai desa.”

## 2. Rencana Tanggap Darurat

### 1) Tersedianya divisi pengelola bencana

“iya betul, kami ini yang mengelola bencana di tingkat kelurahan, kami yang terjun langsung ke masyarakat.”

**2) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

“pasti ada mbak, karena pembagian tugas ini juga kan berfungsi supaya tidak ada tumpang tindih perintah atau kebingungan siapa berbuat apa.”

**3) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian**

“kebetulan FPRB bekerjasama dengan Kelurahan ini juga sudah menentukan titik-titik untuk tempat evakuasi. Ada di Bulak Mabul, balai desa sini, kemudian ada juga di Makam Maulana Maghribi itu. Itu yang ada di Kelurahan sini ya mbak, tapi kalau dari Pantai Parangtritis itu lebih dekat ke Bulak Mabul. Tapi kalau di Bulak Mabul itu tidak ada bangunannya, jadi hanya jalanan saja itu yang tempatnya tinggi. Kalau di makam dan di balai desa sini ada bangunannya. Kalau di makam itu tapi jalannya agak rusak dan sulit dijangkau untuk kendaraan roda empat. Paling enak memang tempat evakuasinya di balai desa ini, tapi kalau dari pantai kan lumayan jauh.”

**4) Tersedia peta bahaya tsunami dan peta evakuasi**

“ada di markas kami.”

**5) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

“ada, disepanjang pinggir pantai sudah diberikan rambu.”

**6) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

“kami sudah pernah melakukan simulasi berkaitan dengan jarak tempuh dari pantai ke tempat titik evakuasi. Dulu kami ukur itu sekitar 20 menit, jadi kurang terjangkau kalau harus lari ke balai desa. Dari pantai mau tidak mau bisa berlari ke bulak mabul, kalau warga yang agak jauh dari bibir pantai bisa lari ke

makam atau ke balai desa. Kemudian, kendala kami sebagai forum yang ada di dekat wilayah pantai ini lain daripada yang lain. Karena kami juga memiliki objek wisata ya. Paling sesekali kami akan berikan informasi melalui pengeras suara di pos SAR, kemudian di jalan sudah terpampang rambu-rambu jalur evakuasi juga. Setiap hari kita selalu siarkan, tapi waktunya tidak menentu. Memang kami lebih fokus untuk memberi himbauan untuk tidak berenang di laut, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk menyiarkan jalur-jalur evakuasi atau informasi jika terjadi tsunami.”

**7) Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)**

“kami dari FPRB hanya ada personil, kalau alatnya belum ada. Jadi kami sudah bentuk tim-tim yang bisa diposisikan di dapur umum, dan sebagainya itu. Tapi hanya personil saja. Soalnya orang sini tuh kalau ada kejadian, terus butuh alat apa mereka yang mengajukan diri ‘nih pak aku nggowo alat ini, aku ini’ gitu.”

**8) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

“kami sudah seringkali mengadakan pelatihan dan tadi juga saya katakan, bahwa kami mayoritas dari masyarakat, baik itu dari PAUD, TK, sampai yang sudah dewasa. Kami melibatkan seluruh RT dan tokoh masyarakat. Nah kalau kami tidak mampu mengadakan ini sendiri, kami akan menurunkan ke BPBD Kabupaten Bantul. Biasanya kami kumpulkan masing-masing RT, jadi kami perintahkan masing-masing RT membawa berapa personil. Jadi bisa mewakili untuk penyebaran ke masyarakat nantinya. Untuk pelatihan memang kami belum bisa rutin tiap bulan, tapi pasti kami adakan 1 tahun paling tidak 1x pelatihan. Nah kalau pelatihan terkait tsunami ini

baru kami adakan 2x mbak. Karena masalah tsunami ini juga baru diangkat di sini.”

**d. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf**

“anggota kami saat ini sudah ada 103 orang, nah 47 orang itu masih baru masuk, jadi mereka baru mendapat pelatihan pemadam kebakaran dan covid jenazah. Kalau sisanya, itu semua sudah dapat pelatihan lengkap termasuk tsunami ini.”

**e. Mobilisasi Sumber Daya**

**1) Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando**

“kalau disini, komando itu di Pak Lurah. Tapi kalau melibatkan banyak instansi, komando ada di BPBD.”

**2) Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah**

“kami disini menggunakan HT, kami kemarin memberikan 47 biji dari 11 dusun. Memang kami suruh pegang. Lalu relawan juga kami berikan, beberapa RT juga kami berikan HT.”

**3) Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat**

“kami semua sudah terlatih dan memang harus terlatih karena kami garda terdepan.”

**4) Telah teridentifikasi jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pada saat darurat bencana**

“kalau secara tertulis tidak ada, tapi kalau tradisionalnya kita sudah tau kalau ada beberapa tanaman di sekitar TEA ini yang bisa digunakan untuk bahan pangan alternatif itu kayak ketela dan daun papaya.”

**5) Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat**

“biasanya kami mengumpulkan warga yang kami ambil dari tokoh masyarakat, kemudian kami berikan sosialisasi tentang kebencanaan. Kemudian saya wanti-wanti peserta yang kita undang tadi untuk menyebarkan atau edukasi ke masyarakat masing-masing. Dari 55 RT yang diundang, ada sekitar 4 RT yang izin.”

**6) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

“untuk materi ini kami berikan fotokopi, itu kami berikan saat kegiatan.”

**7) Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan**

“sudah.”

**8) Tersedia informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi**

“paling fotokopi saja.”

**9) Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana**

“nah itu kemarin kami baru menyusun AD/ART itu termasuk ke dalam situ.”

**10) Tersedia rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev**

“ada, setiap tahun. Tapi biasanya kami hanya diundang ke BPBD, yang bikin nanti BPBD.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“yang pertama itu tempat evakuasi sudah ada, himbauan lewat masjid sudah ada. Kedua, dari sisi personil seperti TNI dan Polri, tokoh masyarakat, dan sebagainya sudah saling mendukung.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“tidak ada kalau terkait kesiapsiagaan.”

**11. Ketua RT 05, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul (14 November 2021)**

**a. Pengetahuan**

**1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

“sepengetahuan saya, rumah ini bisa hancur, bisa terluka, bisa meninggal juga mbak.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

“sepengetahuan saya, awalnya tsunami kan ada gempa di tengah laut, seperti tahun 2006 lalu itu, dampaknya sampai kesini tapi tidak parah. Nah untuk evakuasinya itu kita harus lari ke tempat yang lebih tinggi. Waktu tsunami itu airnya sampai sini mbak, tapi karena rumah saya tinggi jadi aman karena airnya juga tidak tinggi. Ini disini kan ada sungai kecil mbak, nah disitu penuh airnya sampai meluap-luap kemarin. Itu bikin panik semua warga, langsung ngungsi semua. Kondisinya seperti ini langsung tinggal semua, masalah dagangan atau kekayaan sudah tidak terpikirkan. Kami itu mengungsi sekitar 2-3 hari

soalnya nunggu air surut, soalnya agak lama itu surutnya. Itu sangat mengejutkan itu mbak. Sempat geger warga. Begitu suara bumm itu padahal di Pangandaran itu terjadinya. Setelah suara itu setengah jam pantai sudah seperti awan mbak, tau-tau airnya sudah sampai depan rumah. Wah habis semua itu mbak, tadinya kan parkir mobil di pinggir pantai, itu kena air semua.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

“masyarakat sini sudah siap kalau terjadi tsunami, kami terbantu sekali karena ada tim SAR, FPRB juga sangat membantu.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

“ada mbak, disini ada puskesmas. Tapi kalau rumah sakit yang memang benar-benar bagus itu belum ada di Parangtritis.”

**b. Kebijakan**

**1) Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana**

“saya kurang tau mbak, karena tidak ada transparansi ke warga ya untuk anggaran-anggaran terkait masalah bencana.”

**2) Terdapat peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat) dan protap pelaksanaan**

“kalau ini seperti bantuan-bantuan itu datangnya dari luar mbak, kalau datangnya dari balai desa saya malah belum pernah tau. Fasilitas di balai desa ini masih kurang menurut saya.”

**c. Rencana Tanggap Darurat**

**1) Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan**

“kalau dari Kabupaten Bantul pasti ada ya mbak, tapi kalau di tingkat desa ini saya belum pernah lihat, sepertinya semua diserahkan sepenuhnya ke Tim SAR, sama FPRB, sama Pol

Air yang menangani semuanya masalah kebencanaan dan keselamatan.”

**2) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian**

“tempat evakuasinya cuma itu saja di tempat tinggi sama balai desa. Kalau di pantai belum ada tuh tempat evakuasi, cuma jalur-jalurnya aja mengarah kemana-kemana itu ada. Cuma kalau tempat, itu belum ada fasilitas tempatnya. Mestinya disediakan tempat untuk warga mengamankan diri. Ini kalau evakuasi kita hanya lari bebas aja ke bukit di sebelah sana.”

**3) Tersedia peta bahaya tsunami dan peta evakuasi**

“saya belum pernah tau mbak, sepertinya belum ada.”

**4) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

“sudah ada, tapi ya gitu. Menurut saya sih jumlahnya masih kurang. Tempatnya juga kurang mudah terlihat.”

**5) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

“biasanya tuh yang diundang sosialisasi hanya internal mereka saja mbak. Soalnya saya untuk masalah itu belum pernah diundang. Tau-tau sudah ada penataan seperti itu. Jadi sepertinya hanya jajaran pemerintah kabupaten dan desa saja ya. Jadi tidak melibatkan warga untuk datang membuat itu tidak.”

**6) Tersedia nomor hotline informasi bencana**

“ada mbak, tapi warga biasanya tidak simpan, yang simpan biasanya anggota FPRB itu. Saya selaku RT malah ndak punya. Cuma saya pernah lihat.”

**7) Tersedia prosedur pengadaan bahan dan perlengkapan kebutuhan dasar dalam keadaan darurat**

“kemarin tuh saat ada pengungsian, orang dari organisasi-organisasi itu datang membawa logistik mbak.

**8) Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)**

“saat mengungsi itu memang disediakan tenda dari balai desa, tenda terpal gitu mbak bukan tenda kain. Tapi setelah selesai itu tenda ditaruh mana saya ndak tau, tapi memang itu dari balai desa. Nah kemarin itu tidak ada MCK mbak, jadi warga apa ya istilahnya... bebas aja gitu mbak mencari tempat MCK ke tempat warga. Jadi ndak ada fasilitas yang disediakan. Kalau kita butuh, ya mencari sendiri di rumah warga. Itu saat 2006 ya mbak, saya kurang tau kalau sekarang sudah ada fasilitas untuk MCK disaat-saat bencana atau belum. Saat 2006 itu warga-warga di sekitar tempat pengungsian yang bantu.”

**9) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

“kalau yang kemarin itu dari sini sih cuma anggota FPRB dan anggota Tim SAR aja mbak itu. Soalnya saya sendiri selaku RT ndak dapat undangan atau perintah atau pemberitahuan itu ndak ada. Warga juga ndak ada yang ikut. Tapi pernah ada mbak sosialisasi, bukan gladi.”

**d. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal**

“disini ndak ada mbak begitu-begituan. Karena tsunami itu baru pas tahun 2006, itu juga kecil. Kalau bisa jangan sampe ada lagi sih.”

**2) Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan**

“ada sirine mbak disini, bunyinya dari Pos Tim SAR itu loh mbak, nah kalau berbunyi itu sebagai tanda bahwa warga harus menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.”

**3) Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan**

“disini kan ada tim SAR dan FPRB mbak, jadi sebelum itu pasti ada sirine dan diberikan kabar kepada warga bahwa ini terdapat keadaan bahaya supaya warga menyingkir atau menyelamatkan diri dan mencari ke tempat yang aman. Selain sirine, biasanya kalau ada gempa besar, warga itu memantau pantainya bagaimana kondisinya. Tenang atau tidak, ada gejolak atau tidak. Kalau ada gejolak langsung siap pergi gitu. Itu warga yang disini ya mbak, kalau yang di belakang sana ndak. Hanya manut-manut saja yang di RT 8 RT 4. Mereka ndak tau wilayah di depan pantai bagaimana kondisinya. Terus setelah ada peringatan itu, diberitahukan juga untuk membawa surat-surat penting dan berharga, itu saja.”

**e. Mobilisasi Sumber Daya**

**1) Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana**

“ada mbak, jadi karena ada FPRB dan Tim SAR itu yang memberikan peringatan bencana, kita ikuti mereka saja biasanya. Disuruh menyelamatkan diri ya kita pergi, disuruh tetap tenang ya kita percaya saja mbak.”

**2) Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat**

“paling ini ya mbak, kayak sosialisasi gitu mbak.”

**3) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

“sebenarnya ada, tapi harus ke balai desa dulu kalau mau dapat.”

**4) Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan**

“tidak ada setau saya, tapi kalau dari dinas pariwisata kurang tau ya mungkin ada.”

**5) Tersedia informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi**

“tidak ada mbak. Paling pihak-pihak seperti BPBD, BMKG, Tim SAR, FPRB itu punya mungkin.”

**f. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“ini mbak, tim tim dari SAR itu sangat cekatan, lalu pekerja medis itu sudah ada, jadi kalau terjadi bencana tim medis langsung diarahkan ke lokasi.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“saya rasa, program-program pemerintah itu belum bisa mencakup semua, istilahnya masih belum terasa oleh warga.”

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“ini sempat dibahas di rapat kemarin, tapi saya lihat belum tersentuh mbak belum ada perubahan gitu. Jadi kita adakan

rapat atau perkumpulan itu untuk mendiskusikan apa yang dibutuhkan ke depannya.”

**12. Ketua RT 06, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul (14 November 2021)**

**a. Pengetahuan**

**1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

“yang pertama itu rumah pada rubuh, terus kita semua bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan nyawa, terus karena rumah rubuh kita juga bisa kehilangan tempat tinggal.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

“kalau penyebab saya tau, itu dari gempa, terus apa ya... itu aja sih kayaknya.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

“kalau kerentanan... menurut saya sih tidak rentan ya, karena semua orang juga pasti tau kalau terjadi tsunami kita harus lari ke tempat tinggi, semua mesti tau karena itukan sudah selalu disebut-sebut di tv, di media-media lainnya. Nah kalau disini untuk lari ke tempat tinggi tuh kalau menurut saya sih mudah ya, soalnya disini deket gunung to mbak, kalau misal masyarakat tau lebih awal akan terjadi tsunami, mungkin bakal lebih cepet juga bisa menyelamatkan diri.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

“ada puskesmas mbak disini, tapi setau saya ya disini Tim SARnya gercep mbak, di Tim SAR itu ada ambulansnya juga.”

**b. Rencana Tanggap Darurat**

**1) Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian**

“ada, disini ada di bulak mabul sama di makam itu loh mbak. Tapi saya belum pernah kesana, jadi ndak tau juga bagaimana

bentuk tempat evakuasinya. Cuma saya tau kalau bulak mabul dan makam itu dijadikan tempat evakuasi tsunami mbak.”

**2) Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

“ada mbak di depan sana yang di pinggir pantai sama di pinggir jalan belakang sana mbak.”

**3) Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

“saya baru 3 tahun mbak disini, tapi selama saya tinggal disini tuh belum ada ya kegiatan sosialisasi seperti itu.”

**4) Tersedia nomor hotline informasi bencana**

“saya kurang tau mbak kalau itu, ndak ada sepertinya.”

**5) Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

“kemarin itu ada mbak suara sirinenya terdengar, tapi memang kita tidak dilibatkan, tidak diberi informasi apa-apa juga. Mungkin yang mengikuti Tim SAR sini ya mbak. Sirine yang ada disini itu rutin mbak dibunyikan, mesti ada info dulu dari sana lalalala baru berbunyi nanti. Sirinenya tuh toa buat masjid itu loh mbak yang buat nyiarin adzan. Saya kurang perhatiin sih mbak untuk intensitasnya, tapi kayaknya sebulan sekali tuh mesti bunyi mbak.”

**c. Sistem Peringatan Bencana**

**1) Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan**

“setau saya sih disini ada pendeteksi tsunami itu loh mbak yang di pinggir jalan. Terus ada sirine juga di masjid-masjid sini.”

**2) Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan**

“disini kita ada grup WA mbak, khusus buat warga sini mbak itu grupnya. Biasanya kalau ada informasi apa-apa, disebarakan lewat grup itu. Terus ada Tim SAR juga to, kalau ada gempa sirine di masjid-masjid itu dibunyikan. Disinikan sering gempa mbak walaupun kecil-kecil gitu gempunya.”

**d. Mobilisasi Sumber Daya**

**1) Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana**

“saya ndak tau ya mbak, ada kesepakatannya atau tidak. Kita sih cuma kalau ada apa-apa kita ikut arahan dari Tim SAR saja mbak.”

**2) Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat**

“selama tiga tahun saya disini sih belum ada mbak pelatihan atau bimbingan soal kebencanaan. Ada FPRB, tapi kayaknya kalau tsunami tuh belum pernah ada selama saya disini. Kalau saya lihatnya yang paling aktif itu Tim SAR mbak, mereka gercep soalnya kalau ada laka air gitu.”

**3) Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**

“saya kurang tau, saya juga kurang *aware* sih mbak sama begituan. Saya ga berusaha mencari juga, mungkin kalau dicari ada ya mbak.”

**4) Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan**

“belum pernah.”

**e. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1) Apa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“masyarakat itu sudah paham mbak kalau terjadi ini harus ngapain tuh wis paham, tsunami kalau jangka waktunya cepet harus lari kemana, gitu sih.”

**2) Apa faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“kalau yang saya rasakan, disini warganya tuh banyak ya mbak ya, bisa 1000 KK sendiri satu desa tuh. Jadi penyampaian ke masyarakat langsungnya itu butuh waktu dan butuh tenaga ekstra kali ya. Soalnya disini juga banyak pendatang to mbak, terus disini juga banyak yang ngekos, jadi mau mengedukasikannya juga butuh ekstra, apa.. susah gitu mbak.”

**3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami?**

“kayaknya itu mbak didirikan apa sih namanya, itu loh mbak di pinggir pantai ada kayak apa sih, pendeteksi gempa dan pendeteksi tsunami dini. Cuma kayaknya kurang ini ya... saya sih ndak tau itu berfungsi apa tidak, sama itu aja sih mbak sirine ya kalau yang saya lihat dan saya rasakan itu saja.”

**13. MJ, Pedagang di Pantai Parangtritis (8 November 2021)****e. Pengetahuan****1) Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan**

“kalau terjadi tsunami disini, itu nanti barang-barangnya bisa ikut ke laut. Kita juga bisa ikut ke laut, jadi saya takut.”

**2) Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana**

“ndak tau saya.”

**3) Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami**

“saya ndak tau kerentanannya, tapi kalo menurut saya, kalau tsunami terjadi berarti kita harus lari ke gunung supaya ndak dibawa sama airnya.”

**4) Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis**

“saya kurang tau.”

**f. Kebijakan****e. Mengetahui adanya peraturan terkait organisasi pengelola bencana**

“saya ndak tau.”

**f. Mengetahui adanya peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi**

“kurang tau ya.”

**g. Mengetahui adanya peraturan terkait sistem peringatan bencana**

“ndak paham saya mbak soal peraturan-peraturan.”

**g. Rencana Tanggap Darurat****k. Mengetahui adanya organisasi pengelola bencana**

“SAR ya mbak.”

**l. Mengetahui adanya pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi**

“mesti ada, tapi saya ndak tau pembagiannya seperti apa.”

**m. Mengetahui adanya tempat evakuasi untuk pengungsian**

“oh iya, kalau terjadi tsunami itu lari ke situ loh mbak kan ada gunung (menunjuk arah Bulak Mabul). Soalnya airnya ndak bisa kesana. Bisa lah 5 menit naik motor kesana.”

**n. Mengetahui adanya peta bahaya tsunami dan peta evakuasi**

“harusnya ada, tapi saya kurang tau bentuknya seperti apa.”

**o. Mengetahui adanya rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi**

“ada mbak, itu mbak kalo jalan kesana ada tanda-tanda itu loh mbak yang warna hijau. Ada juga di depan sini, yang ngasih tau kalau laut itu bahaya. Ndak boleh main kesini, ndak boleh mandi disini, itu ada tanda-tanda bahayanya mbak.”

**p. Mengetahui adanya rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan**

“ndak ada mbak, tau-tau itu tanda-tandanya sudah terpasang.”

**q. Mengetahui adanya posko bencana**

“ndak tau.”

**r. Mengetahui adanya nomor hotline informasi bencana**

“ndak tau juga.”

**s. Mengetahui adanya unit SAR**

“oh ya saya tau ini. Itu loh mbak yang warna oren tempatnya disana.”

**t. Mengetahui adanya peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)**

“oh ya, ini ada, sudah disiapkan kalau tenda gitu ada.”

**u. Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)**

“ada mbak, saya lihat gladi kemarin. Banyak ambulansnya. Tapi saya cuma lihat tok.”

**h. Sistem Peringatan Bencana**

**e. Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal**

“sepertinya ndak ada ya mbak.”

**f. Mengetahui adanya teknologi sistem peringatan bencana**

“ini saya kurang tau mbak, tapi ada seperti tiang-tiang banyak di dekat pantai sana, ndak tau tapi saya itu untuk apa.”

**g. Mengetahui adanya instalasi peralatan untuk peringatan bencana**

“ndak tau saya.”

**h. Mengetahui adanya sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan**

“nah ini dari SAR itu mbak, kalau ada apa-apa itu diumumkan pakai toa, ada gempa, ada ini, ada ini, gitu mbak, SARnya ngasih tau sama orang-orang.”

**i. Mobilisasi Sumber Daya**

**g. Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana**

“kita ikut kata SAR saja mbak, mereka kan lebih paham ya, kita hanya ikut saja. Tapi kalau kita lihat air sudah sampai depan kita ndak tunggu SAR kita lari saja pokoknya.”

**h. Mengetahui adanya komunikasi publik yang berkaitan dengan informasi keadaan darurat (secara regular dan bertanggung jawab)**

“saya ngertinya tuh dari SAR aja mbak, karena kalau dari SAR pasti benar.”

- i. Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat**  
“sepertinya ada, tapi saya ndak pernah ikut.”
- j. Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan**  
“ndak ada mbak.”
- k. Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan**  
“saya ndak pernah tau mbak yang seperti ini.”
- l. Mengetahui informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi**  
“ndak tau.”

**LAMPIRAN 7**  
**DAFTAR KEBIJAKAN DAN PERATURAN TERKAIT KESIAPSIAGAAN**  
**BENCANA DI KABUPATEN BANTUL**

No.	Kebijakan/Peraturan	Keterangan
1.	Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018	Pembentukan dan Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Bantul.
2.	Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2018	Tugas, fungsi, serta tata kerja BPBD Bantul.
3.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015	penyelenggaraan tanggung jawab sosial
4.	Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2013	Kesiapsiagaan serta peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk Kabupaten Bantul.
5.	Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011	RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
6.	Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2021	RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
7.	Rencana Strategis BPBD Bantul 2016-2021	Acuan kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan bencana.
8.	Rencana Strategis PMI 2019-2024	Pedoman untuk melaksanakan tujuan PMI salah satunya peningkatan mutu dan cakupan pelayanan dalam penanggulangan bencana.
9.	Perka BNPB No.8 Tahun 2011	Standarisasi data kebencanaan.
10.	Pedoman BNPB 2013	Pedoman untuk perencanaan tempat evakuasi sementara tsunami.
11.	Pedoman BNPB 2014	Pedoman untuk perencanaan jalur dan rambu evakuasi tsunami.

**LAMPIRAN 8**  
**KONDISI EXISTING PERALATAN BPBD KABUPATEN BANTUL**

No.	Nama Alat	Jumlah Minimal (Standar Perka BNPB)	Jumlah Existing	Kondisi Layak	Kondisi Tidak Layak
1.	Mobil Komando	5	0	0	0
2.	Mobil Ambulans	5	0	0	0
3.	Mobil Rescue	5	2	2	0
4.	Mobil Operasional	5	2	2	0
5.	Mobil Dapur Umum	3	1	1	0
6.	Mobil Tangki BBM	1	0	0	0
7.	Mobil Tangki Air	2	2	2	0
8.	Perahu Karet	15	3	3	0
9.	Perahu Karet Bermesin	5	3	1	2
10.	Pelampung	50	100	50	50
11.	Mesin Pompa Air	3	1	0	1
12.	Chainsaw	5	15	8	7
13.	Dump Truck	1	0	0	0
14.	Bronjong	500	100	100	0
15.	Tenda Komando	1	1	0	1
16.	Tenda Peleton	5	5	5	0
17.	Tenda Regu	70	6	6	0
18.	Tenda Keluarga	100	19	9	10
19.	Tenda Pos Kesehatan	5	1	0	0
20.	Truck Trailer	2	0	0	0
21.	Motor Trail	10	4	4	0
22.	Instalasi Penjernih Air	1	1	0	1
23.	Velbet	100	26	16	10
24.	Dapur Umum	3	1	1	0
25.	Alat Komunikasi	5	75	50	25
26.	Genset + Lampu Sorot	5	1	0	1
27.	Peralatan Tukang	50	0	0	0
28.	Life Detector	7	0	0	0

**LAMPIRAN 9**  
**PERSEDIAAN BARANG DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Kasur	Lembar	20	Gudang Kabupaten Bantul
2.	Velbed	Unit	10	
3.	Rompi Pelampung	Unit	20	
4.	Tenda gulung	Lembar	57	
5.	Matras	Lembar	235	
6.	Kain Sarung	Potong	124	
7.	Selimut Wol	Potong	181	
8.	Family Kit	Paket	16	
9.	Kids Ware	Paket	41	
10.	Food Ware	Paket	22	
11.	Makanan Tambahan Anak	Paket	74	
12.	Panci Dandang	Buah	82	

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Islamia Kharimah, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1996. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Supardi dan Ibu Dewi Yana. Peneliti memulai pendidikan formal di SD Negeri Pondok Terong 1 Depok pada tahun 2003 – 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Depok pada tahun 2009 – 2012 dan SMA Negeri 9 Depok tahun 2012 – 2015. Selepas SMA peneliti melanjutkan studi ke jenjang S1 di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Geografi tahun 2015-2020. Setelah menyelesaikan studi S1, peneliti mendapatkan beasiswa S2 di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Program Studi Manajemen Bencana pada tahun 2020. Selama berkuliah di Universitas Pertahanan RI, peneliti telah mendapatkan 20 sertifikat terkait seminar kebencanaan dan pertahanan, peneliti telah melakukan Kuliah Kerja Dalam Negeri dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Kuliah Kerja Dalam Negeri di Pidie Jaya, Aceh, Kuliah Kerja Luar Negeri dengan mengundang pemateri dari ICHARM, Kobe University, Nagoya University, NIED, dan Tohoku University, serta peneliti telah mendapatkan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.